

**ANALISIS DIPLOMASI MARITIM INDONESIA MELALUI
KEKETUAAN INDONESIA DI FORUM REGIONAL *INDIAN
OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA)* PERIODE 2015 – 2017**



Oleh :

PRIYANTI HANDAYANI

051101503125013

FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pendidikan Studi Hubungan Internasional**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

JAKARTA

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Priyanti Handayani
NIM : 051101503125013
JUDUL : ANALISIS DIPLOMASI MARITIM INDONESIA MELALUI
KEKETUAAN INDONESIA DI FORUM REGIONAL *INDIAN
OCEAN RIM ASSOCIATION* (IORA) PERIODE 2015-2017
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURUSAN : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk melakukan sidang dihadapan tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia.



Menyetujui

Jakarta, 1 Januari 2016

Pembimbing I

(Partogi Samosir, MA, Ph. D)

Pembimbing II

(Syafriil Alam, S. IP, MM)

Dekan

(Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M. Si)

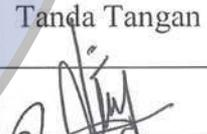
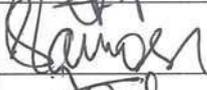
Ketua Prodi

(Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M. Si)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

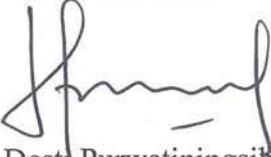
NAMA : Priyanti Handayani
NIM : 051101503125013
JUDUL : ANALISIS DIPLOMASI MARITIM INDONESIA
MELALUI KEKETUAAN INDONESIA DI FORUM
REGIONAL *INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION*
(IORA) PERIODE 2015 – 2017
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURUSAN : Ilmu Hubungan Internasional

Telah disahkan oleh Dewan Penguji
Dalam sidang skripsi 15 Februari 2016

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Fitra Deni, M. Si	Ketua Sidang	
2	Partogi Samosir, MA, Ph. D	Penguji I	
3	Syafril Alam, S. IP, MM	Penguji II	

Mengetahui,

DEKAN FISIP


Dr. Sri Desta Purwatiningsih, M. Si

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, (SKRIPSI) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Satya Negara Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tim penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, 15 Februari 2016

Yang membuat pernyataan



Priyanti Handayani

KATA PENGANTAR

Do the best, but don't feel the best

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menjadi penyemangat utama dan motivasi terbaik dibalik segala kegiatan selama masa perkuliahan. *I love you so much mom and dad.*

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia (FISIP-USNI). Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaiannya, sehingga tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektorat Universitas Satya Negara Indonesia beserta jajarannya
2. **Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M. Si**, selaku Dekan FISIP USNI beserta jajarannya

3. Seluruh Staff dan Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Fitra Deni, Ibu Shinta Herindrasti (*Mommy Shinta*), Ibu Is, Bapak Irzal, Ibu Nur Azizah, dan lain-lain.
4. **Bapak Partogi Samosir, MA, Ph. D**, selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan sabar membimbing penulis dengan memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. “Thanks pak togi, *you always give your best for everyone. Im so proud to know you*”
5. **Bapak Syafril Alam, S. IP, MM**. selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan teliti mengamati setiap penulisan di setiap bab guna untuk memperbaiki tulisan-tulisan yang kurang tepat.
6. Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia khususnya BPPK ASPASAF, **Mas Sigit Aris Prsetyo** “Terimakasih banyak mas Sigit atas segala bantuannya serta materi-materi yang telah diberikan, *thats very useful to me*. Mohon maaf kalau merepotkan dan sering mengganggu waktu bekerjanya.”
7. **Bapak Firdaus Dahlan**, Direktur Sekertariat IORA di Mauritius, yang berkenan untuk memberikan pencerahan dengan *interview* atau wawancara seputar IORA.
8. *All my best friends in Skripsweet Group* Chintia (Miss Galak), Wahyu Wibowo (Super Rempong), Teguh Lodra (Kopral jadi-jadian), Mukhlis (pedagang sejati), Edo Kedol (pelawak sepanjang masa), Bang Fendi (*Super cool*), Kak Eti (*calm girl*), dan Yustin Kadmayer (Miss Papua).

Senang sekali bisa berjuang bersama-sama dengan kalian, calon-calon diplomat masa depan (Amin). *See u on top guys.*

9. ***My best class mate ever, Poetra Achock Haekal***, sang realis sejati. *Thank you so much bro for everything we all know that you are so helpful.*

Ernawati, yang sudah terlebih dahulu lulus, *I miss you my princess.*

10. ***The next Skripsi Warriors*** (Edi Hoemaedi, Teguh Widi, Muh. Yusuf, Obe, dll.) Segera tuntaskan urusan negara ya Bapak-bapak.

11. **HIMAHI USNI** *especially* angkatan 2011-2012 banyak pembelajaran melalui HIMAHI yang tak terlupakan, semoga terus berguna di kemudian hari dan ilmu-ilmu yang diserap bisa diaplikasikan ke masyarakat. Untuk kepengurusan HIMAHI saat ini (Jenifer, Tabita, dan kawan-kawan yang lain) tetap semangat ya

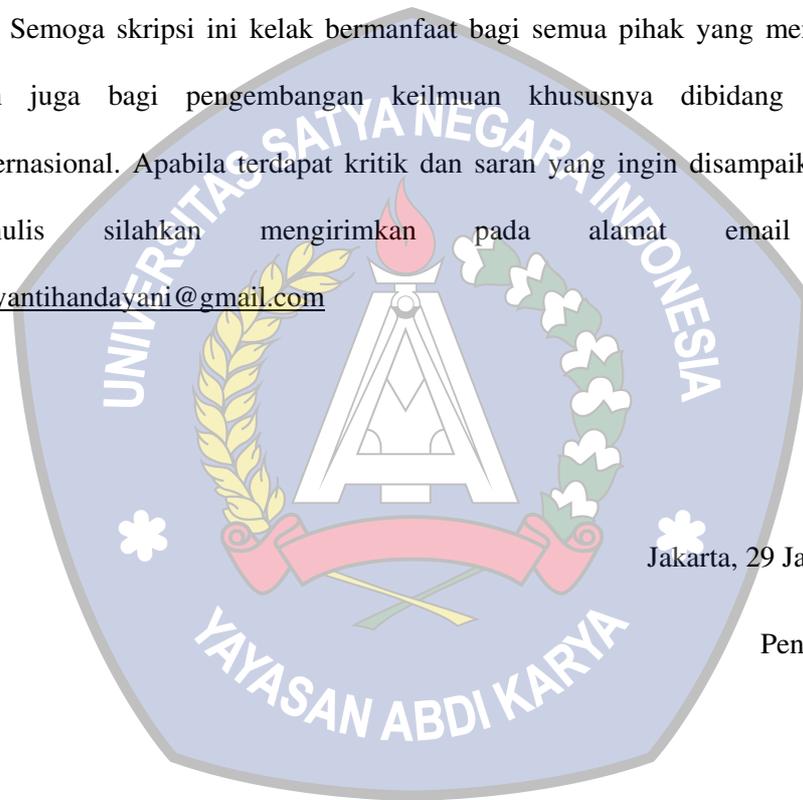
12. **KAM USNI** angkatan **Panca Lane Ray Soko Guru**, Mega, Furi, Susi, Suto, Mas Agus, Dimas, Oggy, Hadi Permana Harja (Ayang), dll. *Too much story i can't describes. All of you are amazing*

13. ***My junior as my daughters in college***, Astari, Dea Astra Angga. Dua perempuan menggemaskan, yang selalu punya banyak rekomendasi makanan enak. Thanks yah berkat kalian diriku suka lupa sejenak dengan skripsi. Hehe

14. ***Another Juniors*** (Rico, Faskah, Ari Kusuma, Aci, Yola, Nuar, Devgan, Kya, Amel, dll)

15. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu ada, mendukung, dan meluangkan waktunya untuk saling bertukar informasi.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT senantiasa memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini kelak bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan juga bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Hubungan Internasional. Apabila terdapat kritik dan saran yang ingin disampaikan kepada penulis silahkan mengirimkan pada alamat email penulis priyantihandayani@gmail.com



Jakarta, 29 Januari 2016

Penulis,

Priyanti Handayani

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Konsep Kebijakan Luar Negeri.....	14
2. Pengertian Maritim dan Negara Maritim.....	16

3. Konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.....	18
F. Alur Pemikiran.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Diplomasi.....	35
B. Teori Regionalisme.....	39
C. Teori Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>).....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Teknik Pengumpulan Data.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	51
1. Objek Penelitian.....	51
2. Subjek Penelitian.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53

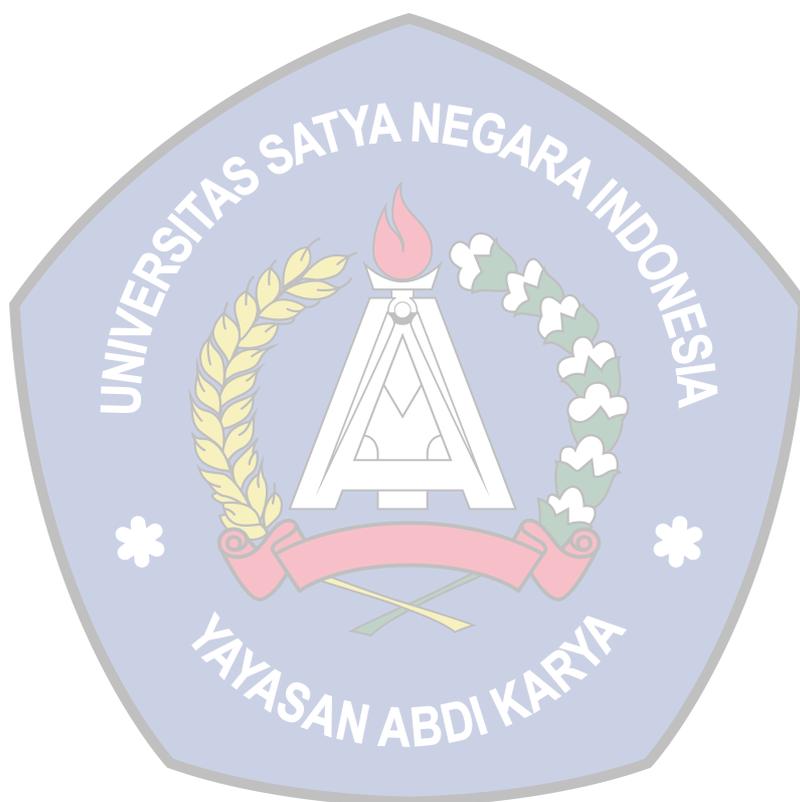
BAB IV PEMBAHASAN

A. <i>Indian Ocean Rim Association (IORA)</i>	54
1. Arti Strategis Samudera Hindia.....	54

2. Sejarah dan Perkembangan <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA).....	56
3. Organisasi dan Kelembagaan IORA.....	60
3.1 Struktur IORA.....	60
3.2 Mekanisme Kerjasama IORA.....	62
4. Perkembangan Terkini IORA di Enam Prioritas Kerjasama.....	65
B. Visi dan Misi Indonesia sebagai Ketua IORA.....	67
1. Penegasan Indonesia sebagai Negara Maritim di IORA.....	71
2. Kepentingan Strategis Indonesia di IORA.....	76
C. Diplomasi Maritim Indonesia di IORA.....	85
1. Peluang dan Tantangan Diplomasi Maritim Indonesia di IORA.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
C. Daftar Pustaka.....	98
D. Lampiran-lampiran.....	101

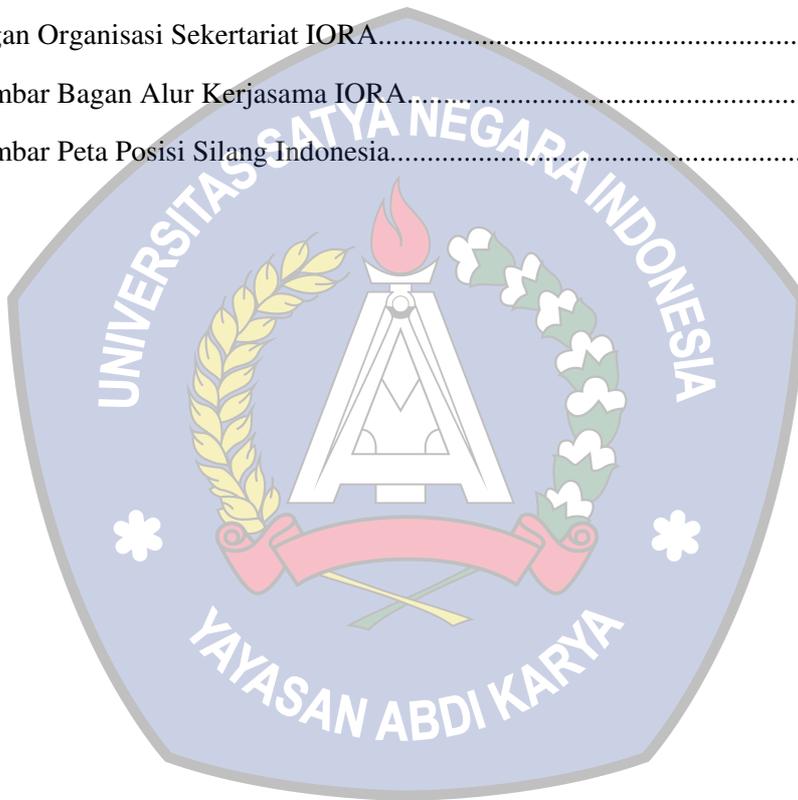
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Populasi dan Perdagangan Produk Negara.....	76
Tabel Perdsagangan Indonesia dengan Negara-negara IORA.....	81



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar Peta Samudera Hindia.....	7
Gambar Peta Members of IORA.....	60
Bagan Organisasi Sekretariat IORA.....	62
Gambar Bagan Alur Kerjasama IORA.....	65
Gambar Peta Posisi Silang Indonesia.....	71



ABSTRAK

Gagasan visi poros maritim berangkat dari visi dan misi Pemerintah 2014-2019 yang memuat cita-cita Indonesia sebagai negara maritim. Salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan tersebut dilakukan melalui penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim dengan membuka peluang kerjasama di kawasan Samudera Hindia. IORA (*Indian Ocean Rim Association*) merupakan salah satu kendaraan Indonesia untuk memperkuat diplomasi maritim di Samudera Hindia. Sebagai ketua periode 2015-2017, Indonesia dapat mengisi keketuaannya dengan penguatan kerjasama maritim yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota IORA lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa saja peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi maritim di IORA, dan Apa saja visi misi Indonesia sebagai ketua di IORA dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana diplomasi maritim Indonesia melalui keketuaan Indonesia di IORA periode 2015-2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi peluang dan tantangan diplomasi maritim di kawasan Samudera Hindia, Indonesia akan memperkuat kelembagaan IORA dan mendorong regionalisme di Samudera Hindia serta memperbaiki infrastruktur laut. Selain hal tersebut, visi misi Indonesia sebagai ketua di IORA sejalan dengan program pemerintah yaitu untuk memberdayakan sumber kemaritiman dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Adapun visi misi tersebut ditingkatkan melalui enam prioritas IORA yakni, keamanan maritim, budidaya perikanan dan perairan, energi, manajemen risiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta pariwisata dan pertukaran budaya.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya ialah pengembangan kerjasama di kawasan Samudera Hindia dapat dilakukan dengan diplomasi maritim karena Samudera Hindia merupakan bagian tak terpisahkan dari poros maritim Indonesia. Ketika segala aspek dalam laut bisa dimanfaatkan tentunya segala dimensi yang terkait dengan diplomasi maritim bisa dirasakan oleh setiap kalangan.

Kata Kunci : Poros Maritim, Diplomasi, Samudera Hindia, IORA

ABSTRACT

The vision idea of maritime fulcrum depart from vision and mission the government 2014-2019 containing ideals Indonesia as maritime nation. An effort in realize the idea will be done through strengthening identity Indonesia as maritime nation by opening the prospect of cooperation in the region Indian Ocean. IORA (Indian Ocean Rim Association) is one of vehicles Indonesia to strengthen diplomacy maritime in the Indian Ocean. As a chairman in the 2015-2017 period, Indonesia can fill that chairmanship by strengthening the cooperation maritime by other of IORA member countries.

Identification of the problems in this research is what are the opportunities and challenges for Indonesia to do diplomacy maritime in IORA , and what is the vision of Indonesia as a chairman in IORA by using the method research descriptive qualitative. The purpose of this research is to analyze how diplomacy maritime Indonesia through Indonesian chairmanship in IORA period of 2015-2017.

The result of this research showed that to face opportunities and challenges diplomacy maritime in the region Indian Ocean, Indonesia will strengthen the institutional of IORA and promote regionalism in the Indian Ocean including improvements infrastructures of the sea. Besides that, the vision of Indonesia as a chairman of IORA in line with government programs which is to empower maritime source in achieve the economic growth and improving the prosperity. Therefore the vision and mission could be enhanced through the six priority of IORA, there are maritime security, aquaculture and water, energy, disaster risk management , technology and knowledge, and tourism and cultural exchange.

The conclusion of this research is development of cooperation in the Indian Ocean can be done by maritime diplomacy because the Indian Ocean is a part inseparable from the Indonesia maritime fulcrum. When all aspects in the sea could use of course all dimensions associated with maritime diplomacy can be felt by every section.

Key words: Maritime fulcrum, Diplomacy, Indian Ocean, IORA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada dikawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, yaitu diantara benua Asia dan Australia serta samudera Hindia dan Pasifik. Luas laut yang 5,8 juta km² dan terdiri lebih dari 17.500 pulau menyebabkan sektor maritim menjadi salah satu sektor penting bagi Indonesia.¹

Kedigdayaan Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang dikenal luas hingga ke daratan Eropa dan Timur Tengah, berangkat dari kekuatan maritim yang luar biasa. Namun kejayaan tersebut seolah meredup setelah Indonesia terjajah bangsa kolonial selama lebih dari 350 tahun. Tak pelak masa tersebut sedikit banyak telah menggeser paradigma masyarakat Nusantara dari orientasi maritim menjadi daratan. Keyakinan ini diperkuat oleh fakta bahwa penjajah lebih memilih merampas rempah-rempah (baca: kekayaan di darat) ketimbang potensi sumber daya hayati di laut Indonesia.

Kebangkitan paradigma maritim kembali terlihat ketika Djoeanda dkk. merumuskan dan berhasil mendeklarasikan Naskah Djoeanda pada tanggal 13

¹ Vitto, Sigit A, Erry W. Prasetyo, “*Diplomasi Poros Maritim Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri*”, Jakarta: Bppk Kemlu, 2015 hlm. 1

Desember 1957. Deklarasi ini menjadi dasar perjuangan Bangsa Indonesia untuk diakui sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional.²

Gagasan Negara Nusantara atau Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) berhasil dikukuhkan setelah lahirnya konvensi PBB tentang hukum laut atau yang lebih dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada 10 Desember 1982. Proses ratifikasi pun berlangsung tak lama berselang, tepatnya pada tahun 1985 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985, setelah diratifikasi oleh 60 negara dan resmi berlaku tahun 1994, UNCLOS mengesahkan tambahan wilayah nasional Indonesia seluas 3,1 juta km² wilayah perairan dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).³

Perjuangan Bangsa Indonesia untuk kembali meraih kedaulatan sebagai Negara Maritim sangatlah beralasan. Jika dilihat dari aspek geografis, dua per tiga wilayah Nusantara terdiri dari lautan, dengan total luas sekitar 5,8 juta km². Adapun potensi ekonomi kelautan Indonesia diantaranya⁴:

1. Di sektor perdagangan, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan dengan total populasi sebanyak 249 juta jiwa ditambah GDP sebesar USD 868, 3 triliun serta pendapatan perkapita sebesar USD 3.500. Jumlah populasi yang besar, di sisi lain, juga menjadi modalitas di sektor ekonomi.

² Kajian Mandiri BPPK Aspasaf Kemlu, "Indonesia dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) Tahun 2015 – 2017: Peluang dan Tantangan", Jakarta, 2014, Hlm. 29

³ Ibid, Hlm. 30

⁴ Ibid,.

2. Di bidang perikanan tangkap laut, perairan Indonesia memiliki potensi sekitar 6,5 juta ton/tahun dan potensi budi daya laut mencapai 12,55 juta hektar.
3. Dasar laut perairan Indonesia kaya akan potensi kandungan cadangan minyak dan gas bumi
4. Di sektor kekayaan keanekaragaman hayati kelautan, Indonesia merupakan marine mega bio-diversity terbesar di dunia. Kekayaan 8.500 spesies ikan (37% dari spesies ikan dunia), 555 spesies rumput laut 950 biota terumbu karang menegaskan dominasi kekayaan keanekaragaman hayati ini.
5. Di sektor sumberdaya terbarukan, wilayah kedaulatan laut Indonesia memiliki potensi energi pembangkit listrik. Potensi energi tersebut berasal dari pasang surut permukaan laut, ombak laut, dan panas laut.
6. Di sektor pariwisata, sebagian besar objek wisata di Indonesia terletak di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Garis pantai yang membentang sepanjang 95.181 km menyimpan potensi pariwisata bahari yang menakjubkan. Dengan demikian, Indonesia selanjutnya mampu mendorong kerjasama pariwisata dengan negara-negara kepulauan kecil yang menjadikan pariwisata laut sebagai devisa utama negara, seperti Maladewa, Mauritius, dan Seychelles.
7. Perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka dan jalur ALKI, memiliki potensi industri yang begitu luar biasa.

Selain melihat berbagai potensi di kelautan Indonesia, tidak dapat dipungkiri salah satu hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia adalah kondisi Infrastruktur laut, seperti kemampuan daya angkut armada nasional yang masih terbatas yang hanya mencapai 54,5 % dan 4% untuk ekspor, keterbatasan jumlah pelabuhan yang memenuhi standar internasional sehingga memicu hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura, keterbatasan akses permodalan bagi nelayan dan petani, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan, dll.⁵

Tingginya tingkat ketergantungan antar negara dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi di era globalisasi membuat Indonesia tidak dapat berjuang sendiri. Tidak heran apabila Indonesia menganut kebijakan pengembangan kerjasama di kawasan dengan mengedepankan diplomasi maritim sebagai agenda utama dalam mengembangkan potensi kelautan Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah mengajak rakyat Indonesia untuk mengembalikan kejayaan laut Indonesia. Sebuah visi yang tertuang dalam konsep poros maritim yang disampaikan pada pidato pelantikannya dan kemudian secara resmi diluncurkan pada KTT Asia Timur ke-9. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah

⁵ Dikompilasi dari paparan Dr. Luky Adrianto, Kepala Pusat Pengkajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam Pertemuan Kelompok Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014 dan Majalah Trans Media, Peluang Indonesia dalam Transportasi Laut Dunia, Kementerian Perhubungan, edisi 06/2012 hlm. 9

menegaskan untuk mengedepankan nilai kelautan demi mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia melalui lima pilar, yaitu:

1. Pembangunan budaya maritim Indonesia
2. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan rakyat
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim
4. Kerjasama maritim melalui diplomasi, dan
5. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim

Dari kelima pilar tersebut, salah satunya disebutkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia ialah melakukan kerjasama maritim melalui diplomasi, poin tersebut dapat diaplikasikan melalui kerjasama Indonesia di forum-forum regional misalnya melalui *ASEAN Maritime Forum* dan *ASEAN Masterplan on Connectivity* yang merupakan agenda dan forum di ASEAN yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memastikan bahwa isu kerjasama di sektor maritim tetap menjadi agenda utama sesuai dengan kepentingan nasional.

Diplomasi, intinya kerjasama. Artinya ada dua pihak atau lebih yang secara bersama melakukan sesuatu yang saling menguntungkan.⁶ Dalam konteks diplomasi, poros maritim harus dilihat dalam tiga dimensi, yang didalamnya kerjasama dengan negara sahabat dapat dikembangkan.

⁶ Darmansjah Djumala, "Mendiplomasikan Maritim, Memaritimkan Diplomasi", Majalah Gatra edisi 11 Febuari 2015, hlm. 62

Pertama, dimensi kedaulatan (*sovereignty*). Dalam konteks implementasi poros maritim, hal pertama yang harus dipastikan adalah Indonesia berkedaulatan penuh di laut teritorial dan hak berdaulat atas sumber-sumber kelautan di ZEE.⁷

Kedua, dimensi keamanan (*Security*). Menjadi poros maritim bukan saja berarti berperan sebagai pusat dinamika dan kegiatan ekonomi di antara dua benua dan dua samudera yang berbasis maritim. Menjadi poros membawa konsekuensi dan tanggungjawab. Jika Indonesia ingin menjadikan Nusantara sebagai pusat aktivitas maritim di kawasan, Indonesia harus memastikan bahwa laut teritorial dan sekitarnya aman.

Ketiga, dimensi kesejahteraan (*prosperity*). Dimensi kesejahteraan poros maritim terkait dengan upaya membangun ekonomi Indonesia tidak hanya memanfaatkan sumber kelautan saja, tetapi juga memanfaatkan dinamika dan interaksi maritim yang terjadi di wilayah laut.⁸

Selain ASEAN, konsep poros maritim juga harus digaungkan di kawasan Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan bagian tak terpisahkan bagi sistem poros maritim Indonesia. Oleh karenanya, penelitian tentang Samudera Hindia dilakukan dengan mempertimbangkan pilar atas visi poros maritim yang secara strategis memerlukan perhatian lebih dalam atas Samudera Hindia dengan dinamika dan persoalan yang dihadapi.

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid., hlm. 63

Samudera Hindia memiliki bobot strategis bagi Indonesia, baik dari segi geo-politik maupun geo-ekonomi. Selain sebagai jalur pelayaran utama distribusi minyak dan gas dunia, Samudera Hindia juga dilalui alur komoditas perdagangan internasional *Western Indo-Pacific*, yang meliputi Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Laut Arab, Teluk Bengal, Laut Andaman hingga ke Selat Malaka dan Singapura.⁹



Sumber: <http://www.yourchildlearns.com/online-atlas/indian-ocean-map.htm>

Pertumbuhan Samudera Hindia saat ini semakin memiliki nilai politik dan ekonomi. Terdiri dari 40 negara dengan lebih dari 2 miliar penduduk didalamnya. Secara geografis, Samudera Hindia merupakan samudera terbesar ketiga di dunia sesudah Samudera Pasifik dan Atlantik.¹⁰

⁹ Kajian Mandiri BPPK Aspasaf Kemlu, Opcit., hlm. 33

¹⁰ Sigit Aris Prasetyo, "Indonesia's Chairmanship of IORA 2015-2017 and Beyond", Sesdilu Batch-55, 2015, hlm. 2

Sebagai Samudera yang terbesar ketiga di dunia, Samudera Hindia diprediksikan sebagai kawasan yang paling penting dalam dekade berikutnya. Robert Kaplan (2009) misalnya menyebutkan arti strategis yang berbobot di Samudera Hindia. Robert Kaplan selanjutnya berpendapat bahwa Samudera Hindia akan menjadi pusat keamanan pada abad ke 21.¹¹

Melihat nilai strategis di kawasan Samudera Hindia, Indonesia sudah seharusnya memaritimkan diplomasi di kawasan tersebut melalui organisasi internasional *Indian Ocean Rim Association* (IORA). IORA merupakan forum kerjasama di kawasan Samudera Hindia yang memiliki potensi demikian besar, yang mempersatukan negara-negara dari kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia dan Australia.

Indian Ocean Rim Association (IORA), sebelumnya dikenal dengan *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC) didirikan pada tahun 1997 oleh 14 anggota negara, seperti Australia, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, dan Yaman.

Keanggotaan IORA telah berkembang sejak pembentukannya tahun 1997. Sampai tahun 2015, IORA terdiri dari 21 negara. Somalia telah bergabung sebagai anggota baru di tahun 2015. Pertumbuhan keanggotaan ini merupakan tanda bahwa IORA memiliki strategi penting. Ada tujuh mitra dialog dari IORA yang tergabung dalam program-program dan proyek kerja dari IORA

¹¹ Ibid.,

yaitu diantaranya Amerika Serikat, China, Perancis, Inggris, Jerman, Jepang, dan Mesir. Jerman merupakan mitra dialog yang baru yang bergabung di tahun 2015 ini.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh IORA belum terlampaui signifikan seperti halnya organisasi internasional lainnya, seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain, kendati demikian sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara di Kawasan Samudera Hindia, IORA dipandang berpotensi untuk menjadi forum yang krusial di kawasan khususnya pada periode keketuaan Indonesia 2015 - 2107 saat ini.

Periode keketuaan IORA tahun 2015 – 2107, dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di Samudera Hindia sebagai negara yang sangat penting di wilayah Indo Pasifik. Dengan demikian, keketuaan Indonesia selama dua tahun ini merupakan kesempatan dan modalitas bagi Indonesia untuk mendapatkan manfaat yang sejalan dengan diplomasi maritim dan juga mengimplementasikan doktrin poros maritim.

Sebagai salah satu tujuan utama poros maritim Jokowi, adalah untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan, oleh karena itu, Indonesia perlu fokus dalam mengembangkan infrastruktur di Sumatera, Jawa, dan beberapa pulau lainnya yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara domestik, pemerintah Indonesia bisa mengembangkan kesadaran nasional atau masyarakat tentang manfaat strategis Samudera Hindia.

Semangat nasional untuk kembali kejayaan maritim, antara lain melalui mekanisme IORA, seperti halnya yang dikemukakan di dalam Visi-Misi Presiden – Wakil Presiden RI terpilih yang telah dijelaskan sebelumnya, seyogianya patut didukung semua pihak. Pengembangan konsep wawasan mata laut melalui sinkronisasi antara kepentingan nasional dengan program IORA niscaya merupakan salah satu cara dalam merebut kejayaan maritim Indonesia.

Indonesia didukung dengan pemerintah yang memiliki *Ocean Leadership* yang cerdas dan berwawasan global yang mempunyai visi dan strategi yang cerdas serta kreatif untuk keluar dari paradigma agraris tradisional ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasan global. Bukan karena ingin menjadi negara *superpower* yang bisa menyaingi Amerika tetapi demi kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa serta peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan bangsa.

Air yang membuat segala yang ada di atas tanah menjadi tumbuh dan bertahan hidup. Kekayaan sumber daya laut apabila mampu dikelola dan dikembangkan dengan baik maka segala unsur kehidupan yang ada di bumi akan terjaga kelestariannya.

B. Rumusan Masalah

Menjadi poros maritim dunia bukanlah sebuah mimpi atau khayalan, pada dasarnya konsep poros maritim sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Saat ini adalah momen terbaik untuk menghidupkan kembali sektor maritim yang telah lama redup. Khususnya pada periode tahun 2015 – 2017 yang memiliki arti penting bagi pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia karena Indonesia mampu memperluas kerjasama di kawasan melalui forum IORA.

Indian Ocean Rim Association (IORA) harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong kerjasama maritim yang komperhensif di kawasan mengingat posisi Indonesia saat ini yang menjadi ketua dalam forum regional tersebut. Posisi ketua dimanapun diyakini akan memainkan peranan penting, oleh karena itu Indonesia membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menjalankan fungsinya sebagai ketua. Kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan tentunya harus sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kawasan Samudera Hindia kaya akan sumber daya laut yang menggerakkan negara-negara di lintas kawasan memiliki kepentingan nasional nya masing-masing, Samudera Hindia juga rentan terhadap persaingan antar kawasan yang mengganggu stabilitas kawasan di Samudera Hindia.

Untuk menghindari adanya persaingan dan perebutan pengaruh di kawasan regional Samudera Hindia, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjaga stabilitas kawasan. Dan di sinilah Indonesia dapat memainkan peran, membantu

memperkuat dan mengubah IORA menjadi sebuah forum regional yang disegani.

Mengingat Samudera Hindia memiliki arti strategis dan manfaat bagi Indonesia terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Apa peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi maritim di forum regional IORA?
2. Apa visi dan misi Indonesia sebagai ketua IORA periode 2015 – 2017 dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai peluang dan tantangan Indonesia untuk merealisasikan visi poros maritim melalui kerjasama di kawasan Samudera Hindia.
2. Untuk menjelaskan substansi diplomasi maritim Indonesia melalui mekanisme kerjasama di forum *Indian Ocean Rim Association* (IORA) di kawasan Samudera Hindia yang dimana Indonesia menjabat sebagai ketua di forum tersebut selama kurun waktu dua tahun 2015 – 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilihat dalam dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, antara lain:
 - a. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa Hubungan Internasional maupun mahasiswa lainnya yang mempunyai perhatian dan minat yang sama dalam kebijakan poros maritim dan kerjasama regional Indonesia di bidang kemaritiman
 - b. Sebagai bahan referensi tambahan dan masukan bagi pengembangan studi ilmu Hubungan Internasional
2. Manfaat praktis, yaitu antara lain:
 - a. Khususnya bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan serta mengkaji kebijakan pemerintah terkait visi poros maritim yang masih banyak diperbincangkan di kalangan pemerintah, dan para akademisi.
 - b. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai kerjasama Indonesia dengan Kawasan Samudera Hindia (IORA) dari berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan keamanan melalui kerja sama di bidang maritim.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Menurut Joshua Goldstein mengatakan bahwa pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional.¹² Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan.¹³

Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta benefit untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada.

Menurut Rosenau tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. K.J. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut:

¹² Joshua Goldstein, 1999 "*International Relations*", Longman, New York, hal 147

¹³ K.J Holsti, 1983, "*International Politics : A Framework for Analysis*", Prentice-Hall, New Jersey, hal 107

1. Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.
2. Unsur Waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Menurut KJ. Holsti, dua tujuan yang lebih dominan dalam negara adalah, tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu, indikator ini dinilai berdasarkan industri, teknologi, bantuan dana dan militer.¹⁴ Sedangkan Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideology terakhir dalam sistem internasional, ideologi tersebut merupakan aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional. Bagi Rosenau tujuan jangka panjang adalah untuk perdamaian, kekuasaan dan keamanan.¹⁵

Dalam menyiasati perkembangan di kawasan dan arti penting geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, diperlukan upaya untuk menyusun strategi kebijakan yang tepat bagi pembangunan berkesinambungan kelautan. Dalam hal ini, Indonesia dapat menggunakan paradigma *blue economy* dalam membangun kelautannya.

¹⁴ Ibid., Hal 146

Pendekatan *blue economy* menekankan perlunya peran efektif masyarakat Internasional dalam menangani isu pengelolaan sumber daya di dalam laut maupun di bawah laut, melalui pengembangan hukum laut Internasional dan mekanisme pengaturan lautan yang lebih baik.

2. Pengertian Maritim dan Negara Maritim

2.1 Pengetian Maritim

Maritim berasal dari kata bahasa Inggris, "*maritime*" dari bahasa Latin *mare* adalah berbatasan dengan laut, kehidupan dekat laut atau hal-hal yang berhubungan dengan laut atau terkait dengan laut yang berhubungan dengan navigasi atau pelayaran.

Menurut Hasyim Djalal, anggota Dewan Kelautan Indonesia, menyatakan bahwa maritim adalah laut yang telah dikelola untuk kepentingan kehidupan, yaitu hal ikhwal kekayaan, perilaku, dan budaya terkait laut. Menurut Wikipedia encyclopedia, *Maritime is primarily an adjective that describes objects or activities related to the sea* (Maritim utamanya adalah kata sifat untuk menggambarkan obyek atau aktivitas yang berhubungan dengan laut).

Terdapat sejarah maritim yaitu suatu studi tentang kegiatan manusia dilaut. Sejarah tersebut meliputi unsur sejarah yang tematis dan umum serta digunakan sebagai pendekatan global, walau sebenarnya utamanya

adalah sejarah nasional dan regional. Sebagai subjek akademik, sejarah maritim sering melewati batas-batas disiplin ilmu, terfokus pada pengertian berbagai hubungan kemanusiaan dengan kelautan, laut dan berbagai jalan laut dunia. Sejarah nautika, dan sejarah maritim umpamanya, direkam dan diterjemahkan peristiwa-peristiwa tentang kapal, perkapalan, navigasi dan pelaut-pelaut di masa lalu. Juga termasuk tentang penangkapan ikan, penangkapan ikan paus, hukum maritim internasional, sejarah angkatan laut, sejarah kapal-kapal, rancangan-rancangan kapal, dll.

2.2 Pengertian Negara Maritim

Menurut definisinya, negara maritim adalah negara yang mampu mengelola laut untuk kepentingannya baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Negara maritim juga dapat diartikan sebagai negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun tidak memiliki laut yang luas, melalui kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kapasitas untuk mengelola laut baik ruangnya, posisi strategisnya, dan kekayaan alam di dalamnya.¹⁶

Ir. Drs. Bonar Simangunsong, dalam bukunya Laut Masa Depan Indonesia, mengartikan bahwa negara maritim adalah negara yang

¹⁶ Chandra Motik dan Hasyim Djalal, "Negara Kepulauan menuju Negara Maritim: 75 tahun Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA", Jakarta: Lembaga Laut Indonesia, 2011

memanfaatkan laut bagi kepentingan nasionalnya, berupa industri maritim, menggunakan teknologi maritim dan ikut menjaga, mengamankan, dan melestarikan laut.

Oleh karena itu, mungkin saja suatu negara adalah negara maritim walaupun tidak mempunyai pantai atau negara tak berpantai. Sebaliknya negara kelautan belum tentu negara maritim, karena belum memanfaatkan laut untuk kepentingan nasionalnya, tidak memiliki industri maritim yang memadai dan belum menggunakan teknologi maritim yang maju dan sebagainya.

3. Konsepsi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Indonesia pernah mencapai puncak kejayaan maritim pada abad 7 sampai 14 pada masa Kerajaan Majapahit. Dibawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada, Majapahit menguasai dan mempersatukan Nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing, seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa (Kamboja), Anam, India, Filipina, dan China.

Kilasan sejarah tersebut memberi gambaran kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu mampu menyatukan wilayah Nusantara, dan disegani bangsa lain. Paradigma Masyarakat kala itu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan-keamanan.

Fakta sejarah lain yang menandakan bangsa Indonesia terlahir sebagai “bangsa maritim” adalah dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah di beberapa belahan pulau. Penemuan situs prasejarah di gua-gua pulau Muna, Seram, dan Arguni, yang dipenuhi lukisan perahu-perahu layar, menggambarkan nenek moyang bangsa ini merupakan bangsa pelaut.

Ironisnya, dalam perjalanan kehidupan bangsa, visi maritim Indonesia tenggelam. Masuknya penjajahan kolonial Belanda pada abad ke-18, mengikis jiwa bahari bangsa Indonesia. Masyarakat dibatasi berhubungan dengan laut, dan didorong melakukan aktivitas agraris demi kepentingan kolonialis.

Realita Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki bumi, air, dan kekayaan alam yang sangat besar, termasuk hutan tropis terbesar kedua setelah Brazil. Kedua, karunia Tuhan yang luar biasa itu harus mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia saat ini, tetapi sepanjang masa.

Konsep negara kepulauan (Nusantara), kekayaan sumber daya laut yang berlimpah, posisi strategis antara dua benua dan dua samudera yang menguntungkan secara geoekonomi dan geostrategi merupakan anugerah yang luar biasa bagi negara bangsa Indonesia. Letak geografis yang strategis, sedikitnya 70 persen angkutan barang kapal pesiar super mewah dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, melewati perairan Indonesia.

Wilayah laut yang demikian luas memberikan akses kepada sumber daya alam, seperti ikan, terumbu karang, kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi terbarukan, minyak, gas bumi, dan mineral langka. Belum lagi letak Indonesia di garis katulistiwa yang menyebabkan Indonesia sangat kaya dengan keragaman biota dan menarik banyak wisatawan dunia.

Tak heran, jika Indonesia menjadi bagian dari *grand strategy* bagi negara-negara besar di dunia. Bangkitnya kekuatan baru di bidang kelautan, seperti India, China, Australia, dan Amerika Serikat yang telah maju menjadi tantangan bagi Indonesia. Selain berusaha menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, negara-negara tersebut berlomba mencari cadangan energi untuk kepentingan mereka.¹⁷

Kesadaran dunia terhadap fungsi vital kemaritiman telah mengubah paradigma pembangunan global tentang *blue economy* yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain fungsi transportasi logistik global, laut juga mampu menyerap karbon yang sangat besar untuk menekan pemanasan global. Sejak awal abad ke-20, permukaan laut dan lautan terus naik dengan rata-rata 0,8 derajat celcius.¹⁸

Kini di abad 21, negara-negara di dunia berlomba meningkatkan kekuatan maritimnya. Dua kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat dan

¹⁷ Bernhard Limbong, "Poros Maritim", Jakarta: Margaretha Pusataka, 2015, hlm. 15

¹⁸ IPCC, "Climate Change 2013: The Physical Science Basis – Summary for Policymakers", Observed Changes in the Climate System, 2013, hlm. 2

China, sama-sama berusaha menancapkan pengaruh masing-masing di berbagai kawasan. Mereka bersaing untuk mendominasi kawasan yang disebut pusat kekuatan ekonomi dunia abad ke-21.

Amerika Serikat membangun kekuatan maritim dengan slogan “kekuatan maritim melindungi cara hidup Amerika.”¹⁹ Lahirlah “*A cooperative Strategy for 21st century sea power*”, yang dipublikasikan Oktober 2007 oleh *United State Marine Corps, United States Coast Guard* dan *Department of Navy*. Aliansi dengan NATO membentuk *Global Maritime Partnership Initiative* yang bertujuan menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dibawah pengaruh mereka.

Cina membangun *maritime policy* dengan strategi “*Chain of Pearl*” yang bertujuan membangun dan menyelamatkan urat nadi perdagangannya lewat laut. Untuk itu, lahir proposal terbaru Cina tentang ‘*Silk Route*’ yang menghidupkan kembali jalur sutera di masa lalu. Cina ingin berada diposisi terdepan untuk menguasai kawasan ini.

Sementara itu, India membangun *maritime policy* dengan mengeluarkan “*Freedom to Use Seas: Maritime Military Strategy*” yang bertujuan meningkatkan pembangunan kekuatan angkatan laut India. Inggris pun tidak kalah dengan mengeluarkan semboyan “*Britain Rules the Waves*” yang bertujuan membangun kekuatan maritim Inggris dalam menghadapi era globalisasi.

¹⁹ Bernhard Limbong, Op.cit., hlm. 16

Kini Indonesia berada dalam lingkaran negara-negara besar tersebut. Bahkan, Malaysia dan Singapura merupakan negara kecil berkembang seperti Inggris dengan visi kemaritimannya. Mereka bukan merupakan negara kepulauan tetapi kedua negara tersebut memiliki visi dan *marine policy*.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, pemimpin NKRI belum memiliki *maritime policy* yang jelas dan tegas bermuara pada pembangunan negara maritim yang besar dan kuat. Tidak seriusnya pemerintah terhadap *maritime policy* terlihat jelas dari regulasi (UU) yang tidak memadai dan penegakan umum hukum yang lemah.²⁰ Politik anggaran juga masih sangat rendah, jauh dari potensi keluatan dan perikanan. Indikasi lain, semakin berkurangnya penata kelola maritim di level nasional maupun daerah.

Munculnya visi poros maritim dunia tentu jadi momentum bagi Indonesia menghadapi pertarungan sengit di berbagai kawasan seperti Asia Pasifik dan Samudera Hindia di abad ke-21. Indonesia sudah seharusnya segera bekerja keras mengambil peran kunci di kawasan ini karena posisinya yang sangat strategis, baik dari sisi geoekonomi maupun geostrategi di kawasan tersebut.

Untuk lebih mengetahui lebih jelas mengenai konsepsi poros maritim, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁰ Semua itu menggambarkan betapa dunia kini memandang masa depan ada di laut. Laut tidak hanya dipandang sebagai jalur logistik yang mampu menjangkau dunia, tetapi laut juga dilihat sebagai sumber kehidupan di masa depan

3.1 Pengertian dan Visi

Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang muncul berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia yang mana sebagian besar wilayahnya berupa laut. Disamping itu, konsep poros maritim sejalan dengan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Secara umum, poros maritim adalah visi pembangunan nasional untuk menjadi “pusat” kegiatan ekonomi regional dan global dengan memanfaatkan sumber-sumber dan aktivitas kelautan.²¹

Konsep poros maritim juga dilandasi oleh potensi yang dimiliki Indonesia. Secara geopolitik, historis, dan budaya, Indonesia dapat menjadi negara maritim karena memiliki jumlah pulau terbanyak dan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Poros maritim juga dapat dianggap sebagai rumusan mendasar untuk kembali menguatkan predikat bangsa bahari. Dalam artian bahwa konsep poros maritim menjadi sebuah visi atau cita-cita mengenai bagaimana bangsa Indonesia dibangun kedepannya. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas Nasional sebagai sebuah negara

²¹ Vitto, Sigit A, Erry W. Prasetyo, “Diplomasi Poros Maritim Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri”, Jakarta: BPPK Kemlu, 2015, hlm. 3

kepulauan yang mengantar bangsa Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.

Poros maritim juga harus dimaknai dengan pengarusutamaan nasional di laut. Itu artinya, poros maritim harus diimplementasikan dalam pembangunan kelautan yang bermuara pada terwujudnya negara maritim yang adil, makmur, dan sejahtera.

Poros maritim memunculkan berbagai kegiatan pemanfaatan potensi kelautan yang selama ini belum cukup optimal dikembangkan, seperti industri perikanan, galangan kapal, eksplorasi sumber daya kelautan, pembangkit energi, pusat penelitian, kota-kota dan pemukiman nelayan, pariwisata bahari, dan lain-lain. Poros maritim yang hidup akan merupakan tulang punggung kekuatan besar ekonomi Indonesia diantara kekuatan-kekuatan ekonomi besar di Asia. Dengan demikian, konsep poros maritim mengandung makna sebagai upaya menjadikan laut atau maritim sebagai titik sentral pertahanan dan ekonomi.

Dalam dimensi pembangunan, poros maritim ini tentunya bertujuan untuk membangun wilayah-wilayah pesisir yang penduduknya belum sejahtera dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi kelautan yang ada. Pemanfaatan secara intensif wilayah laut Indonesia akan membentuk poros silang barat-timur dan utara-selatan. Poros ini tidak hanya berupa dua jalur bersilangan, melainkan banyak jalur sehingga membentuk kisi-kisi atau jaring laba-laba di wilayah laut. Pembangunan

poros maritim yang berhasil dilaksanakan kelak akan memungkinkan pergerakan dari satu titik ke titik lain di wilayah Indonesia dengan lebih mudah, cepat dan murah.

Perwujudan poros maritim mengandalkan adanya kesiapan sumberdaya manusia. Hal ini perlu dimulai dengan melakukan pengarusutamaan wawasan bahari ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional.

Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (*maritime domain awareness*, MDA). Wawasan bahari dan MDA perlu ditopang oleh, dan dituangkan dalam, determinasi untuk melakukan penguatan infrastruktur kelautan yang lengkap dan memadai.

Sesungguhnya visi maritim Indonesia dimulai sejak pemerintahan Soekarno menjadi fokus idealisme negeri ini untuk mewujudkan bangsa yang kuat, tidak hanya dari sektor darat tapi juga dari potensi kelautan.

3.2 Paradigma Kemaritiman

Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan sehingga akan membentuk citra subjektif

mengenai realitas dan akhirnya akan menentukan bagaimana menanggapi realitas tersebut.²²

Konsep poros maritim dalam dirinya mengisyaratkan perubahan paradigma. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Secara fisik antar satu pulau dengan pulau yang lainnya dipisahkan oleh laut, namun dari sisi kemaritiman pemisahan itu tidak pernah ada karena seluruh perairan yang ada di nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah.

Laut, bagi kebanyakan suku di wilayah kepulauan kita, merupakan ajang untuk mencari kehidupan. Dari laut dapat dieksploitasi sumberdaya biota dan abiotik, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona. Pada mulanya bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, pada akhirnya bertujuan mengembangkan kesejahteraan atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan maritim. Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui jasa pelayaran antar benua atau antar pulau. Dengan demikian, laut memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, laut mempunyai makna, diantaranya: laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan. Tanpa laut, tidak ada bangsa Indonesia tidak ada negara

²² Denzin dan Lincoln, "*Handbook of Qualitative Research: Competing Paradigms in Qualitative Research*", 1994, hlm. 107

Indonesia. Itu artinya sifat hakiki negara bangsa Indonesia adalah maritim.

Reorientasi paradigma pembangunan bangsa, dari berbasis daratan menjadi berbasis kelautan dan kepulauan harus dilakukan. Reorientasi paradigma pembangunan ini dapat terwujud dengan melaksanakan gerakan perubahan pembangunan ekonomi dan budaya bangsa secara simultan.

Budaya bahari bangsa perlu ditumbuhkembangkan, terutama di kalangan generasi muda agar lebih mencintai laut. Dalam bidang ekonomi, penyusunan tata ruang dan masterplan pembangunan ekonomi harus berdasarkan pada potensi dan dimulai dari kawasan pesisir laut. Kawasan-kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis kluster industri kelautan yang inovatif dilengkapi dengan pelabuhan modern harus dibangun disepanjang wilayah pesisir, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan pulau-pulau kecil.

Semua sektor ekonomi perlu dibangun dengan menggunakan inovasi teknologi, manajemen profesional, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim global serta bencana alam lainnya. Selain itu pembangunan ekonomi kelautan harus bersifat inklusif, mengutamakan rakyat dan swasta nasional. Dengan demikian, pembangunan pembangunan kelautan akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan berkualitas secara

berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat.

3.3 Wawasan Nusantara

Konsep poros maritim tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan konsep wawasan Nusantara. Bahkan dapat dikatakan bahwa poros maritim merupakan perwujudan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bahwa wilayah laut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut, dan tanah yang ada di bawahnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Konsep wawasan Nusantara diperkenalkan pada masa pemerintahan Soekarno, yang pada tahun 1957, melalui Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan wawasan Nusantara. Inti dari wawasan Nusantara adalah wawasan kebangsaan yang meneguhkan asas negara Nusantara atau negara kepulauan.

Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan *Archipelagic State Principle* dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya 'Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia'. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan disekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang

termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang luas, laut yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sarana “penghubung” pulau, bukan “pemisah”. Pulau-pulau yang tersebar secara terpisah di negara kepulauan Indonesia tetap merupakan satu kesatuan unit. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari tanah dan air.²³ Sehingga lazim disebut sebagai tanah air.

3.4 Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia

Gagasan poros maritim dunia dicetuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla yang secara resmi telah dicetuskan pada KTT Asia Timur ke-9, gagasan tersebut didasarkan atas kesadaran akan adanya sebuah transformasi besar di abad ke – 21 ini. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Sebagai negara dengan letak geografis yang sangat strategis, di tengah pusat dinamika

²³ Joko Subagyo, “Hukum Laut Indonesia”, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005, hlm. 35

politik dan ekonomi internasional, Indonesia akan memperkuat perannya di kawasan dan dunia. Posisi sebagai poros maritim dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan tersebut dilakukan melalui penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim dan membuka peluang kerjasama kelautan melalui diplomasi maritim.²⁴

Sejalan dengan program pemerintah 2014–2019 untuk memberdayakan sumber daya kemaritiman dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, diperlukan konsep dan operasionalisasi diplomasi kelautan yang sinergis dengan arah kebijakan nasional. Perumusan kebijakan nasional, khususnya kebijakan kelautan Indonesia, dalam pembangunan bidang kelautan harus menggambarkan keberpihakan kepada masyarakat luas. Selain itu, yang lebih utama adalah terwujudnya kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya kita memahami geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi para pemimpin dalam mengelola dan mewujudkan kepentingan nasional melalui kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan sektor maritim sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Presiden Joko Widodo.²⁵

²⁴ Alex S.W. Retraubun, “Poros Maritim Dunia: Realistiskah?”, TEMPO, 11 Agustus 2014

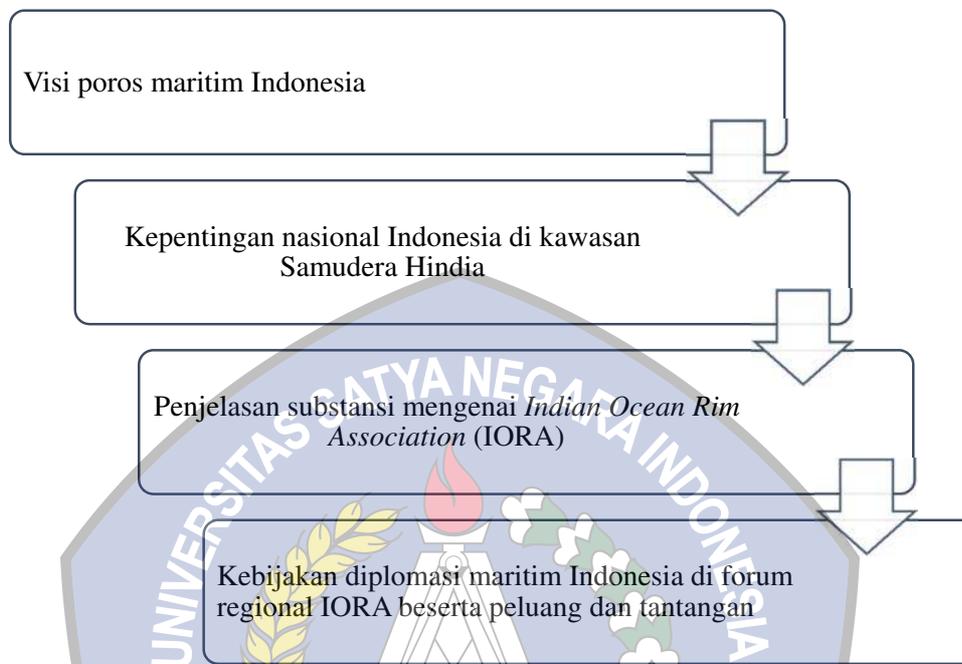
²⁵ Tri Sulistyningtyas, Susanto, dan Dicky R. Munaf, “Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 6

Indonesia sebagai poros maritim dunia selanjutnya memiliki *leverage* untuk diperhitungkan oleh negara lain. Hal tersebut dapat terwujud jika Indonesia dapat tegas mengamankan kepentingan-kepentingannya serta mampu mengelola sumber daya lautnya untuk kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Penerjemahan diplomasi kelautan melalui kebijakan luar negeri untuk mendukung visi poros maritim dunia harus memahami dimensi-dimensi penting diplomasi kelautan atau maritim, yaitu: dimensi kedaulatan (*sovereignty*); dimensi keamanan (*security*); dan dimensi kesejahteraan (*prosperity*).

Dari dimensi kedaulatan, penyelesaian perundingan perbatasan wilayah merupakan prioritas yang harus dilakukan Indonesia. Dari dimensi keamanan, peningkatan kapabilitas pengamanan laut sebagai suatu keharusan, seperti *illegal fishing*, pembajakan, dan kejahatan lintas negara lainnya. Lebih lanjut, dimensi kesejahteraan merupakan tujuan utama diplomasi dan Visi Poros Maritim yang berfokus pada pembangunan Indonesia sebagai negara maritim.

F. Alur Pemikiran



G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab-bab dan sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas, perumusan permasalahan, kerangka konseptual, alur pemikiran, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis serta sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan relevansi antara teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

Landasan teori merupakan dasar pemikiran penulis untuk mengembangkan penelitian dari data-data yang telah ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis metode yang digunakan penulis, teknik pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik analisa, tempat dan waktu penelitian. Metode penelitian pada bab ini menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dimana penulis menguraikan data berdasarkan fakta-fakta yang aktual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana diplomasi maritim Indonesia terkait dengan kerjasama di kawasan Samudera Hindia melalui forum regional IORA yang memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Penulis juga akan membahas mengenai keketuaan Indonesia di

IORA selama dua tahun ke depan dalam perspektif kepentingan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dari proses penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti



BAB II

LANDASAN TEORI

Di dalam penyusunan karya ilmiah, landasan teori merupakan bagian yang sangat penting, karena akan memuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang diteliti dan kemudian digunakan sebagai landasan berfikir atau titik tolak penelitian.

Teori memberikan suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional. Teori memungkinkan kita untuk membuat konseptualisasi dan kontekstualisasi peristiwa-peristiwa di masa lalu ataupun masa kini. Teori juga membekali kita dengan sejumlah cara bagaimana melakukan interpretasi terhadap permasalahan-permasalahan yang kompleks. Teori membantu kita untuk berpikir kritis, logis, dan integratif.¹

Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Teori Diplomasi

Saat ini diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan politik luar negeri sebuah negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional.²

¹ Scott Burchill and Andrew Linklater, *Theories of International Relations*, New York: ST Martin's Press, INC., 1996, hlm. 18

² Mohammad Shoelhi, "Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011, hlm. 73

Dalam hubungan antarnegara, pada umumnya diplomasi dilancarkan sejak tingkat awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral atau multilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Di dalam kamus atau ensiklopedia, kita menemukan banyak ragam arti dan makna kata diplomasi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diplomasi urusan dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraam wakil-wakilnya di negara lain. Diplomasi juga berarti pengetahuan dan kecakapan dalam membina hubungan antara satu negara dengan negara lain.

Secara terminologis, menurut Lord Strang dalam bukunya *The Foreign Office*, sejak abad ke XVIII diplomasi mempunyai arti pekerjaan yang terkait dengan hubungan luar negeri atau pelaksanaan politik luar negeri. Lord Strang menyatakan bahwa diplomasi merupakan pelaksanaan hubungan antar pemerintah berbagai negara melalui wakil-wakil tetap yang ditunjuk untuk itu yang berdomisili di negara tempat ia ditugaskan.

Para ahli di bidang diplomasi memberikan arti beragam untuk diplomasi. Dalam bukunya yang berjudul *Guide to Diplomatic Practice*, Ernest Satow menunjukkan sejumlah definisi diplomasi sebagai berikut³:

³ Ibid., hlm. 75

1. Diplomasi adalah istilah yang dipergunakan sejak dulu bagi sebuah cabang ataupun disiplin ilmu mengenai hubungan luar negeri berdasarkan yang tertera dalam diploma (dokumen-dokumen) tertulis dari raja (Flassan).
2. Diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan luar negeri atau masalah-masalah antarnegara, dan lebih merupakan ilmu atau seni berunding
3. Diplomasi adalah ilmu mengenai hubungan-hubungan serta kepentingan-kepentingan dari negara-negara atau seni untuk mendamaikan/mempertemukan perbedaan-perbedaan gagasan antarbangsa, dan secara lebih khusus lagi, diplomasi adalah seni berunding
4. Diplomasi adalah pemanfaatan seluruh pengetahuan dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melaksanakan serta mengelola aneka urusan resmi antar negara
5. Diplomasi merupakan ilmu mengenai aneka hubungan antar berbagai negara yang tercipta sebagai hasil timbal balik kepentingan-kepentingan dari prinsip-prinsip hukum antarnegara dan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam traktat-traktat ataupun persetujuan-persetujuan internasional.
6. Diplomasi mencakup seluruh sistem kepentingan yang tercipta dari hubungan-hubungan antar negara; tujuannya adalah menjamin keamanan negaranya, keharmonisannya, memelihara martabat serta

kehormatan, dan tujuan langsungnya adalah memelihara perdamaian serta keharmonisan yang lestari antara beberapa kekuasaan

7. Diplomasi lebih banyak merujuk pada seni berunding untuk mencapai persetujuan mengenai berbagai kepentingan antarbangsa dari pada keterampilan mengarsipkan dokumen negara

Harold Nicolson (1985) memberikan definisi diplomasi secara lebih terperinci:

Diplomacy includes the management of international relations by means of negotiation; diplomacy represent a skill to adress ideas in the conduct of international international intercourse and negotiations; diplomacy is the method by which this relations among nations are ajusted and managed by ambassadors and envoys; diplomacy is bussiness or arts of the diplomats to persuade the others.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Arti penting dari diplomasi di kawasan Samudera Hindia ialah untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Secara garis besar melalui teori diplomasi maka sektor maritim disini berperan untuk memajukan kelautan Indonesia melalui promosi, negosiasi, dan *opportunity seeking* oleh pemerintah dalam identifikasi kerjasama di forum IORA.

B. Teori Regionalisme

Regionalisme merupakan suatu kebijakan dan *state project* dimana negara dan aktor non-negara bekerjasama dan mengkoordinasikan strategi demi mencapai kepentingan dalam suatu kawasan tertentu. Tujuan dari regionalisme adalah untuk mengupayakan dan mempromosikan tujuan-tujuan bersama dalam satu isu atau lebih. Meskipun dalam perkembangannya regionalisme selalu disertai anomali dinamika spesifik dalam tatanan geografis, politik, ekonomi, strategis, dan budaya di suatu kawasan, namun regionalisme juga berkembang dengan disertai norma-norma, tren, dan nilai-nilai tertentu yang berlaku pada konstelasi kawasan.⁴

Louis Cantori dan Steven Spiegel mendefinisikan bahwa kawasan atau *region* merupakan dua atau lebih negara yang saling berinteraksi, memiliki kesamaan etnis, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang sering kali mengingkat disebabkan adanya aksi aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.⁵

Beberapa teoritis lain mengklasifikasikan suatu kawasan kedalam lima karakteristik.⁶ Pertama, negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. Kedua, mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural. Ketiga, terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti

⁴ Louise Fawcett, 2005, "*Regionalism from Historical Perspective*", dalam Mary Farrel, *et.al. Global Politics of Regionalism*. London: Pluto Press, hlm. 24.

⁵ Anak Agung, Yanyan Mochamad Yani, "Pengantar Hubungan Internasional". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014. Hlm. 104

⁶ Stephen C. Calleya (ed.). "*Regionalism in the Post-Cold War World*". 2000. Aldershot: Ashgate.

yang tercermin dalam organisasi internasional. Keempat, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dan terakhir, adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Berdasarkan klasifikasi kawasan diatas, tentunya kerjasama Indonesia di kawasan Samudera Hindia sangat terkait dari setiap poin yang telah disebutkan. Dapat dijelaskan bahwa Indonesia memiliki kedekatan geografis dengan Samudera Hindia serta kemiripan sosiokultural dalam bidang maritim. Sehingga terbentuklah pembuatan organisasi internasional IORA di kawasan tersebut dengan kesamaan anggota dari setiap negara yang tergabung di dalamnya untuk saling terikat dan berinteraksi satu sama lain.

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dalam hal ini, pembentukan organisasi regional IORA dan bergabungnya Indonesia dalam organisasi tersebut, Indonesia telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Dengan kata lain, Indonesia telah melakukan distribusi kekuasaan di antara negara-negara lain yang tergabung untuk mencapai tujuan bersama.

Regionalisme di sisi lain menunjukkan pula adanya perdebatan antara tuntutan kedaulatan negara yang harus dipertahankan dan tekanan-tekanan untuk menciptakan tindakan bersama, regionalisme telah menjadi fenomena yang sangat penting dalam dekade terakhir. Dalam konteks ini, regionalisme

telah mengemuka sebagai kekuatan yang memajukan sekaligus mencairkan *statehood*.⁷

C. Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam sistem internasional, pola interaksi antar negara umumnya dilandasi oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap negara. Kepentingan-kepentingan yang didasari hubungan bagi setiap negara dalam hubungan internasional lazim disebut kepentingan nasional. Atas dasar kepentingan nasional, maka suatu negara membentuk dan merumuskan kebutuhan luar negerinya dalam hal menentukan sikap dan mengatur hubungannya dengan negara lain dalam system internasional. Berbagai aspek kehidupan yang akan diwujudkan oleh setiap negara ini diakumulasikan dalam bentuk kepentingan nasional.

Para *Founding Fathers* bangsa Indonesia telah meletakkan dasar-dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana dituangkan di dalam alenia ke-IV Pembukaan UUD RI tahun 1945, yakni sebagai cita-cita luhur dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Secara teori, dalam sistem pengambilan keputusan tingkat nasional yang dianut oleh negara-negara di dunia, masalah kedaulatan atas teritori akan ditempatkan secara hierarki pada tingkat paling atas. Oleh sebab itu, kedaulatan

⁷ Anak Agung,, Yanyan Mochamad Yani, op.cit., hlm. 109

atas teritori menjadi salah satu pilar dalam apa yang disebut sebagai kepentingan nasional (*national interest*) negara bersangkutan. Kepentingan nasional yang tak lain adalah “*The ultimate goals of a nation*” merupakan sesuatu yang tidak bisa dikompromikan.

Banyak pihak sudah terbiasa menggunakan istilah kepentingan nasional (*national interest*). Istilah tersebut sudah digunakan sejak abad pertengahan. Hans J. Morgenthau (1951) mengemukakan bahwa *the concept of the nation interest* pada dasarnya terdiri atas dua elemen, yaitu yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis.⁸

“The statesman must think in terms of the national interest, conceived as power among other powers. The popular mind, unaware of the fine distinctions of the statesman’s thinking, reasons more often than not in the simple moralistic and legalistic terms of absolute good and absolute evil.” (Hans Morgenthau)

Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.⁹

⁸ Hans J. Morgenthau, “*The concept of National Interest*”, 1951

⁹ Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 35

Dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, suatu negara berusaha untuk melindungi dan mempertahankan diri dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negara. Plano dan Olton menyatakan bahwa¹⁰ :

“Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup antar bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”.

Dari definisi diatas, menunjukkan bahwa kepentingan nasional senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Atas dasar kepentingan nasional inilah, suatu negara merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempatkan dalam hubungannya dengan negara lain. Kepentingan nasional merupakan cerminan dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri serta upaya-upaya pemenuhan kebutuhan suatu negara, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta pertahanan keamanan.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan

¹⁰ Jack C Plano dan Roy Olton terj. Wawan Juanda, 1999, “Kamus Hubungan Internasional”, CV Putra Abardin, Bandung, hlm. 7

negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹¹

Kepentingan nasional (*national interest*) menjadi landasan untuk menghadapi berbagai pengaruh lingkungan strategi, baik global, regional, maupun nasional, tantangan maupun kendala. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus tetap dapat menjaga kesatuan dan persatuan, keselamatan dan keutuhan NKRI dengan tetap berpedoman pada empat konsepsi dasar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika, melalui pemahaman Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di semua aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia menyelenggarakan konsepsi pertahanan negara guna menjaga eksistensinya sebagai negara yang merdeka, berdaulat, serta dengan negara lain dalam percaturan dunia melalui politik bebas aktif.

Dari uraian beberapa definisi yang telah disebutkan, kepentingan nasional Indonesia di kawasan Samudera Hindia dalam forum regional IORA adalah:

1. Bidang Politik dan Keamanan

- Menjadikan kawasan Samudera Hindia yang aman dan damai, bebas *piracy*, terorisme, dan kejahatan transnasional lainnya
- Memastikan keamanan dan kelancaran jalur transportasi dan komunikasi di kawasan

¹¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, Op. Cit., hal 35

- Peningkatan kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, termasuk pelaksanaan latihan bersama bidang SAR antar negara anggota di kawasan

2. Bidang ekonomi

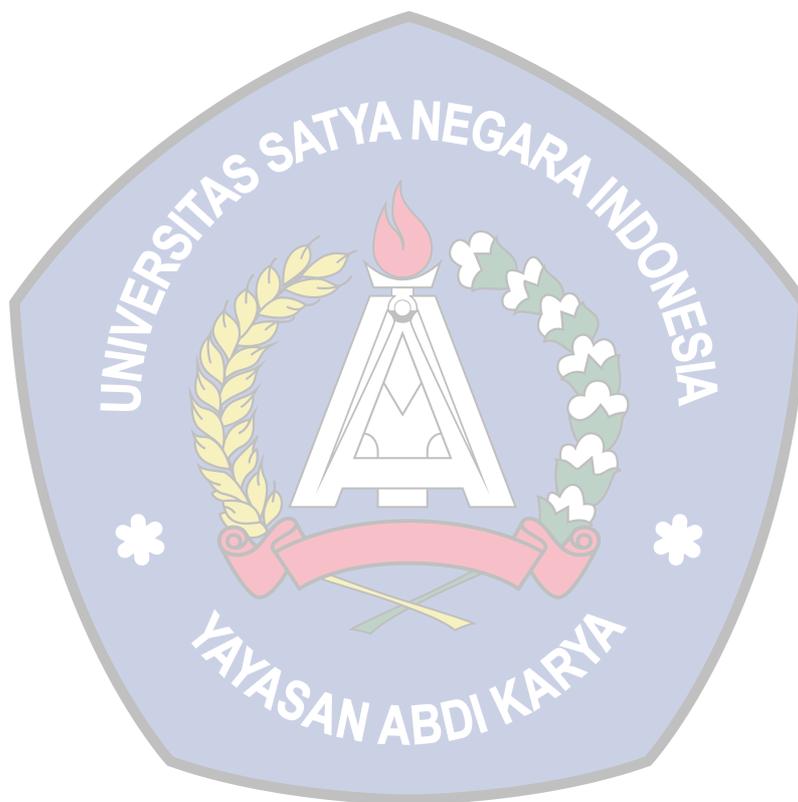
- Promosi kerjasama ekonomi antar anggota yang saling menguntungkan, termasuk transportasi/perhubungan dan komunikasi, perdagangan dan investasi
- Kerjasama dalam upaya pengelolaan sumber daya alam maritim (perikanan, energi, dan mineral) dimana Indonesia harus dapat mengambil manfaat ekonomi
- Peningkatan nilai ekspor Indonesia, nilai investasi asing di Indonesia, dan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

3. Bidang Sosial Budaya

- Meningkatkan intensitas *people to people contact* antara negara-negara anggota IORA guna meningkatkan *socio-cultural exchange* untuk mendekatkan penduduk negara-negara tersebut dan menghindari kesalahpahaman dan mendorong perdamaian
- Pelestarian kekayaan budaya negara-negara anggota IORA, khususnya Indonesia, di antaranya melalui pencatatan sebagai *world heritage* di UNESCO

4. Pelestarian Lingkungan Hidup

- Perlindungan lingkungan hidup di kawasan dari berbagai pencemaran. Mengembangkan *governance system* (sistem tata kelola) pemanfaatan Samudera Hindia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli yaitu :

Menurut **Sugiyono** menjelaskan bahwa:

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Sedangkan pengertian Menurut **I Made Wiratha** metode penelitian adalah sebagai berikut¹ :

“Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.”

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, agar dapat menggali secara mendalam tentang fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang bagaimana kebijakan visi poros maritim Indonesia melalui diplomasi di kawasan Samudera Hindia.

¹ I Made Wiratha, 2006, hlm. 68

Adapun pengertian dari metode deskriptif menurut **Moh. Nazir** adalah² :

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.³ Untuk mendapatkan data yang pasti maka diperlukan berbagai sumber data dalam penelitian ini, dan pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang relevan sesuai dengan pembahasan yang ingin diteliti. Jadi dalam penelitian kualitatif, penulis melakukan analisis data untuk membangun hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak penulis menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data, sampai penulis mendapatkan seluruh data dan membuat kesimpulan untuk hasil yang dianalisa atau diteliti.

² Moh Nazir, 2005, hlm. 54

³ Sugiyono, 2014, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Alfabeta Cv, Bandung, Hal 2

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Macam-macam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, artinya penulis memperoleh data berdasarkan fakta yang nyata melalui observasi
2. Wawancara, digunakan penulis untuk mengumpulkan data melalui narasumber baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung artinya berkomunikasi langsung dua arah, sedangkan tidak langsung yaitu penulis memperoleh data melalui media seperti email dari narasumber
3. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dari berbagai dokumentasi tersebut penulis dapat mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
4. Triangulasi, teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya.⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung dari instansi atau responden melalui wawancara.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

⁴ Ibid., hlm. 85

Menurut **Sugiyono** sumber sekunder adalah⁵:

“Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh penulis yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, tabloid, internet, dan dokumen-dokumen lain baik dari media elektronik maupun non elektronik mengenai permasalahan kebijakan visi poros maritim dan kerjasama regional di kawasan Samudera Hindia.

Sumber data tersebut diperoleh penulis melalui:

1. Perpustakaan Universitas Satya Negara Indonesia (Perpus - Usni)
2. BPPK ASPASAF Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
3. Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pendapat Sugiyono mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut⁶:

⁵ Sugiyono, 2010, hlm. 193

⁶ Ibid., hlm. 13

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).”

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah **“Analisis Diplomasi Maritim Indonesia melalui Keketuaan Indonesia di Forum Regional IORA Periode 2015 - 2017 ”**

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis berkaitan dengan sumber data yang telah dibahas sebelumnya, yaitu didapat melalui berbagai literatur studi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti penulis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Domain, karena teknik ini merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek.

Sehingga teknik analisis Domain dianggap tepat oleh penulis untuk membantu melakukan penelitian

⁷ Ibid., hlm. 89

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Indian Ocean Rim Association (IORA)*

1. Arti Strategis Samudera Hindia

Samudera Hindia merupakan Samudera terbesar ketiga di dunia. Menurut Ensiklopedia Britannica, Samudera Hindia digambarkan membentang sepanjang 10.000 km dari ujung Selatan Benua Afrika hingga ujung Selatan Benua Australia. Samudera Hindia juga mempunyai luas 73,33 juta km², dengan garis pantai sepanjang 66,526 km. Dasar terdalam Samudera Hindia mencapai 7.450 m dibawah permukaan laut yang terdapat di Selatan Pulau Jawa (*Java Trench*).

Samudera Hindia dalam beberapa tahun terakhir telah tumbuh menjadi kawasan yang penting secara politik, ekonomi, dan geo-strategis. Kurang lebih 40 negara yang berada dikawasan serta dihuni oleh sekitar 2 milyar populasi. Secara ekonomi, Samudera Hindia memiliki arti strategis karena sebagai kawasan yang mengandung sumber kekayaan alam melimpah. Beberapa negara di kawasan merupakan penghasil minyak dan gas terbesar dunia.¹

¹ Sigit Aris Prasetyo, "Arti Penting Samudera Hindia dan Visi Poros Maritim", Kajian Mandiri BPPK ASPASAF Kemlu, 2016, hlm. 4

Selain itu, Samudera Hindia juga kaya akan kekayaan alam seperti perikanan dan beberapa produk laut lainnya. Dengan kata lain, Samudera Hindia merupakan kawasan kaya *biodiversity* yang belum banyak di eksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam perspektif *Sea-Line of Communication* (SLOC), Samudera Hindia juga merupakan jalur vital bagi pelayaran dunia. Kurang lebih 2/3 sumber minyak dan gas dunia berada di kawasan ini, serta sekitar 30% produk perdagangan global dan 70 % produk minyak disalurkan atau diangkut melewati Samudera Hindia.²

Wilayah perairan yang tercakup di dalam Samudera Hindia meliputi laut Andaman, Laut Arab, Teluk Benggala, Laut Flores, Teluk Australia Besar, Teluk Aden, Teluk Oman, Laut Jawa, Selat Mozambik, Teluk Persia, Laut Merah, Laut Sawu, Selat Malaka, dan Laut Timor. Berbeda dengan Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, Samudera Hindia berada pada derajat lintang yang rendah dan beriklim hangat.

Sejak masa lampau, Samudera Hindia memainkan peranan yang cukup vital, antara lain sebagai salah satu jalur utama dunia yang menghubungkan Benua Asia, Afrika, dan Eropa, baik dari sektor perdagangan, politik dan militer, kebudayaan, hingga penyebaran agama. Selain itu, peristiwa fenomenal lainnya adalah rangkaian ekspedisi laut bangsa Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He, yang melintasi Samudera Hindia hingga mencapai pantai Mombasa di Afrika pada abad ke – 15.

² Ibid.,

Kawasan samudera Hindia juga merupakan penggerak pertumbuhan perekonomian dunia. *International Monetary Fund* (IMF) mencatat bahwa pada tahun 2013 kawasan ini diperkirakan GDP sebesar US\$ 8 triliun, dari keseluruhan GDP dunia sebesar US\$ 73,9 triliun.³ Kontribusi signifikan tersebut tidaklah mengherankan sebab mengacu kepada laporan IMF tahun 2013, GDP *middle economies* di kawasan Samudera Hindia, seperti Afrika Selatan, Australia, Indonesia dan India berkisar antara US\$ 350 milyar hingga US\$ 1,8 triliun. Keempatnya adalah anggota dari *The Group of Twenty* (G20), forum dua puluh negara ekonomi terbesar di dunia. Kondisi ini tak pelak turut mewarnai kebangkitan Samudera Hindia.

2. Sejarah dan Perkembangan *Indian Ocean Rim Association* (IORA)

IORA (*Indian Ocean Rim Association*), yang sebelumnya dikenal dengan IOR-ARC (*Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation*), merupakan organisasi/forum kerjasama kawasan yang dideklarasikan di Mauritius pada bulan Maret 1997. Sesuai dengan piagam pendiriannya, IORA memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan melalui pendekatan konsensus dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, kemerdekaan politik

³ *International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014.* <http://www.imf.org>.

dan non-intervensi serta hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan.⁴

IORA dapat dikatakan sebagai satu-satunya organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Pasifik Barat Daya, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Pantai Timur Afrika. Hal ini terlihat dari 21 negara anggota yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia seperti Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Persatuan Emirat Arab, dan Yaman. Selain itu, IORA juga memiliki tujuh mitra dialog, yaitu Amerika Serikat, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, dan Mesir.

Perubahan nama "IOR-ARC" menjadi IORA diresmikan dalam pertemuan tingkat menteri ke-13 di Perth, Australia pada 1 November 2013. Keputusan tersebut dipandang sebagai upaya peningkatan kesadaran publik (*public awareness*) terhadap eksistensi forum IORA itu sendiri.

Pembentukan forum kerjasama regional Samudera Hindia pada awalnya lahir dari gagasan bersama Afrika Selatan, Australia dan India. Pada awal dekade 1990-an, Afrika Selatan yang baru lepas dari belenggu politik *Apartheid*, aktif melakukan serangkaian upaya untuk mendapatkan pengakuan dari aktor – aktor regional dan global. Kunjungan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Pik Botha, ke India tahun 1993 berbuah pada pembentukan forum kerja

⁴ Kajian Mandiri BPPK ASPASAF Kemlu, "Indonesia dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) Tahun 2015 – 2017: Peluang dan Tantangan", 2014, hlm. 9

sama regional di Kawasan Samudera Hindia. Respon positif India atas usulan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kekecewaan publik India terhadap mekanisme *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) serta penolakan pengajuan keanggotaan India di dalam *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Di sisi lain, gagasan pembentukan forum regional ini turut disambut baik Australia yang tengah mengembangkan arah politik luar negeri ke kawasan Asia Selatan.

Pada 29-31 Maret 1995, berlangsung pertemuan di Mauritius yang dihadiri oleh para wakil pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis yang berasal dari Afrika Selatan, Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman, dan Singapura membahas pengembangan gagasan kerjasama di antara negara-negara kawasan Samudera Hindia. Didalam pertemuan lanjutan yang berlangsung pada pertengahan Agustus 1995, negara-negara *core member states* (M-7) tersebut berhasil merumuskan piagam pembentukan sebuah mekanisme kerja sama regional yang diberi nama *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC) yang kemudian disebut *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Selain dari pada negara-negara M-7, pertemuan tersebut juga turut juga dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Yaman, Tanzania, Madagaskar, dan Mozambik (M-14). Kemudian, pada pertemuan pertama tingkat Menteri di Mauritius pada 6-7 Maret 1997, para negara M-7 berhasil meresmikan IOR-ARC *charter* yang merupakan fondasi lahirnya IORA seperti saat ini.

Di dalam perkembangannya, IORA terus berupaya untuk memperluas sekaligus meningkatkan intensitas kerja sama di antara negara anggota serta memanfaatkan peran negara mitra wicara. Langkah pembentukan *high level task force*/HLTF yang secara khusus bertugas untuk memetakan sekaligus *me-review* masa depan IORA serta sejumlah isu lainnya yang disinyalir sebagai penghambat kemajuan forum tersebut merupakan upaya untuk memajukan organisasi di kawasan Samudera Hindia.

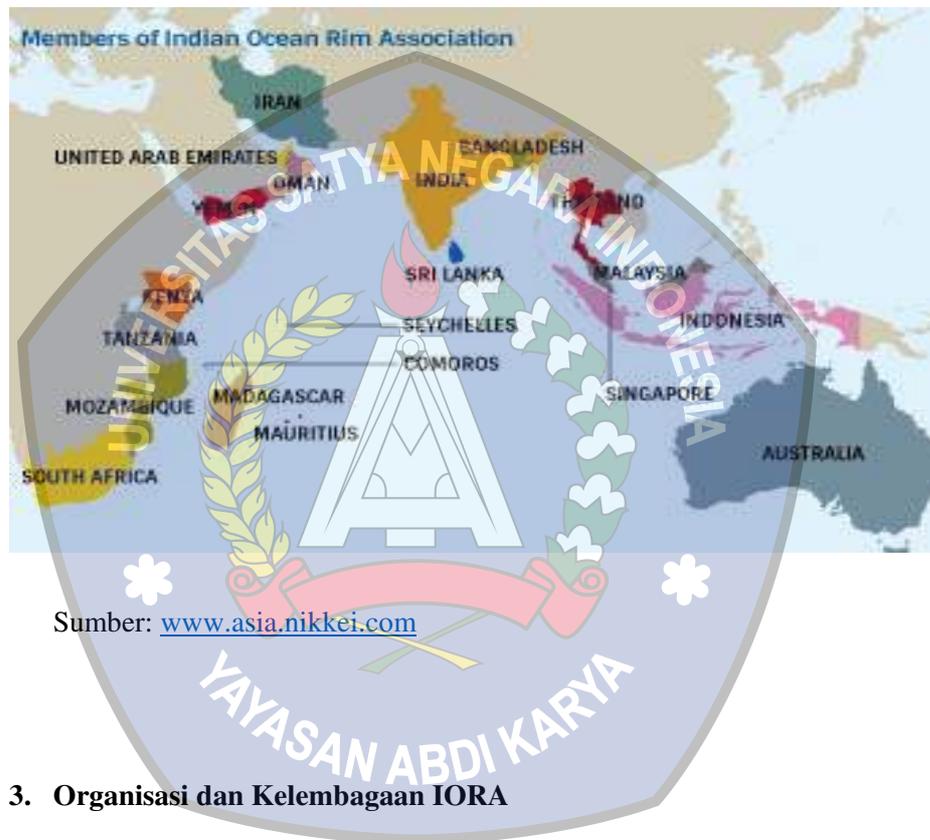
Pertemuan tingkat menteri ke-10 di Sana'a pada Agustus 2010 telah menghasilkan sejumlah pencapaian penting yang terangkum di dalam *Sana'a Communique*. Komunique ini pada intinya menyepakati pembentukan *Maritime Transport Council* (MTC), amandemen IORA *charter* serta penawaran sejumlah *flagship project* kepada lembaga-lembaga subsider IORA, seperti *University Mobily for Indian Ocean-Region*/UMIOR (bidang pendidikan), *Regional Center for Science and Technology*/RCSTT (bidang IPTEK), *Fisheries Support Unit*/FSU (bidang perikanan) dan *Maritime Transport Council*/MTC (bidang transportasi laut).

Pada pertemuan tingkat menteri ke-11 di Bengaluru November 2011, IORA berhasil mengidentifikasi 6 (enam) area prioritas kerjasama, yang meliputi:

1. Keselamatan dan keamanan maritim
2. Fasilitasi perdagangan dan investasi
3. Manajemen perikanan
4. Manajemen resiko bencana

5. Kerjasama akademis, sains, dan teknologi, dan
6. Promosi pariwisata dan pertukaran kebudayaan

Dalam kaitan ini, Dewan Menteri menetapkan program *capacity building* dan *workshop* sebagai *key instrument*.



3. Organisasi dan Kelembagaan IORA

3.1 Struktur IORA

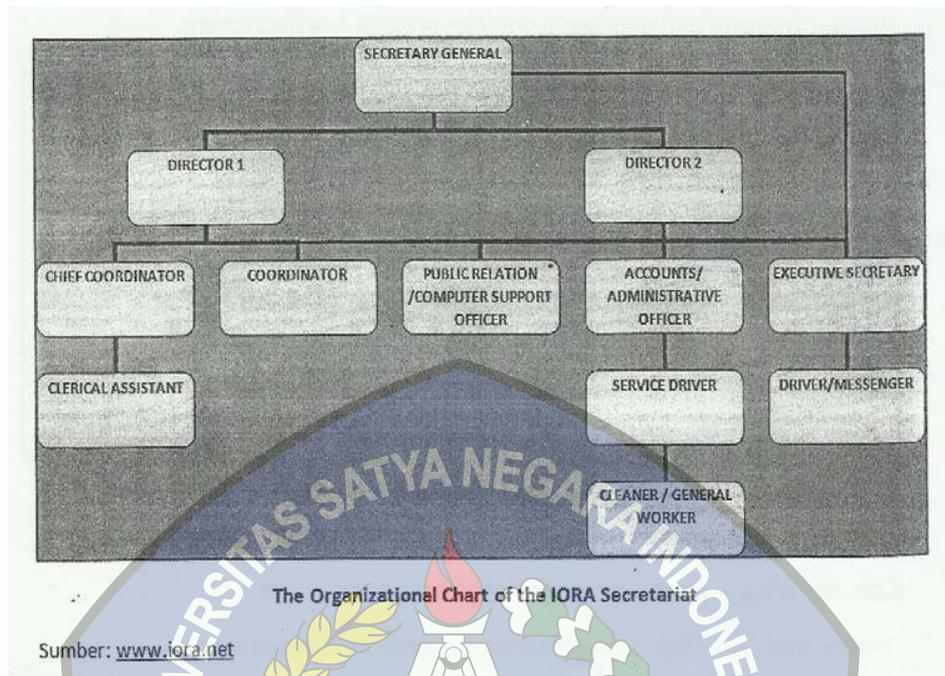
Sekretariat IORA terletak di Cyber City, Ebene, Mauritius dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan dibantu oleh dua Direktur dan staf pendukung lainnya. Ditunjuk oleh Dewan Menteri, Sekjen melaksanakan amanah jabatan selama tiga tahun. Sebagaimana tertuang di dalam butir

5.f.v *Charter and Rule of Procedures*, Jabatan Sekjen dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Saat ini, jabatan Sekjen IORA periode 2012-2014 dan 2015-2018 dipegang oleh Duta Besar KV Bhagirath asal India. Perpanjangan masa jabatan Sekjen Bhagirath tersebut dikukuhkan pada CoM ke – 14 IORA di Perth, Australia, 6 -8 Oktober 2014.

Sekretariat IORA, pada prinsipnya, bertugas melaksanakan kewajiban administratif. Sementara, hak pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua IORA dengan mempertimbangkan persetujuan (konsensus) seluruh negara anggota. Lebih lanjut, Sekretariat IORA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pertemuan, representasi, dan promosi, pengumpulan dan penyebaran informasi, pemeliharaan arsip, registrasi, dan penyimpanan dokumentasi dan bahan penelitian serta pengelolaan sumber daya.

Di sisi lain, Indonesia menaruh perhatian serius pada organisasi regional ini. Bentuk keseriusan tersebut ditunjukkan dengan penugasan seorang pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri RI, Sdr. Firdaus Dahlan, sebagai salah satu direktur pada Sekretariat IORA. *Secondman* tersebut melengkapi formasi direktur di Sekretariat IORA, yang saat ini hanya diisi oleh Mr. H Graham Anderson asal Afrika Selatan.



3.2 Mekanisme Kerjasama IORA

Forum regional IORA bersifat Tripartit. Pemerintah, komunitas bisnis dan akademisi memiliki peranan penting dalam mempromosikan kerjasama dan interaksi yang lebih dekat antarnegara anggota IORA. IORA sendiri dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip regionalisme terbuka, yang dapat diartikan sebagai berikut:⁵

1. Dalam menghasilkan sebuah keputusan, negara-negara anggota IORA tidak terikat (*non-legally binding*) oleh keputusan tersebut. Dengan kata

⁵ Tiga Komponen utama regionalism terbuka IORA meliputi (i) liberalisasi perdagangan, (ii) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (iii) kerjasama ekonomi dan teknik.
<http://www.iora.net/about-us/how-iora-operates/scope-of-work.aspx>

lain, keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat mengikat negara-negara anggotanya.

2. Kerjasama IORA didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, kesejahteraan, integritas teritorial, dan kebebasan politik serta saling menguntungkan. Selain itu, kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi bukan sebagai pengganti ataupun penghalang atas hak dan kewajiban negara anggota baik secara bilateral, regional dan multilateral. Program kerjasama IORA menjunjung tinggi prinsip sukarela.

3. Keputusan diambil berdasarkan prinsip konsensus.

Mekanisme IORA digerakkan oleh tiga pilar, yaitu: (i) *scholars* (subfora *Indian Ocean Rim Academic Group/IORAG*), (ii) pelaku usaha (*Indian Ocean Rim Bussiness Forum/IORBF*), dan (iii) pemerintah (*Working Group on Trade and Investment/WGTI*). Ketiga subfora tersebut memiliki lembaga subsider yang terdiri dari *Regional Center for Science and Technology Transfer (RCSTT)*, *University Mobility for Indian Ocean Region (UMOR)*, *Maritime Transport Council (MTC)* dan *Fisheries Support Unit (FSU)*.

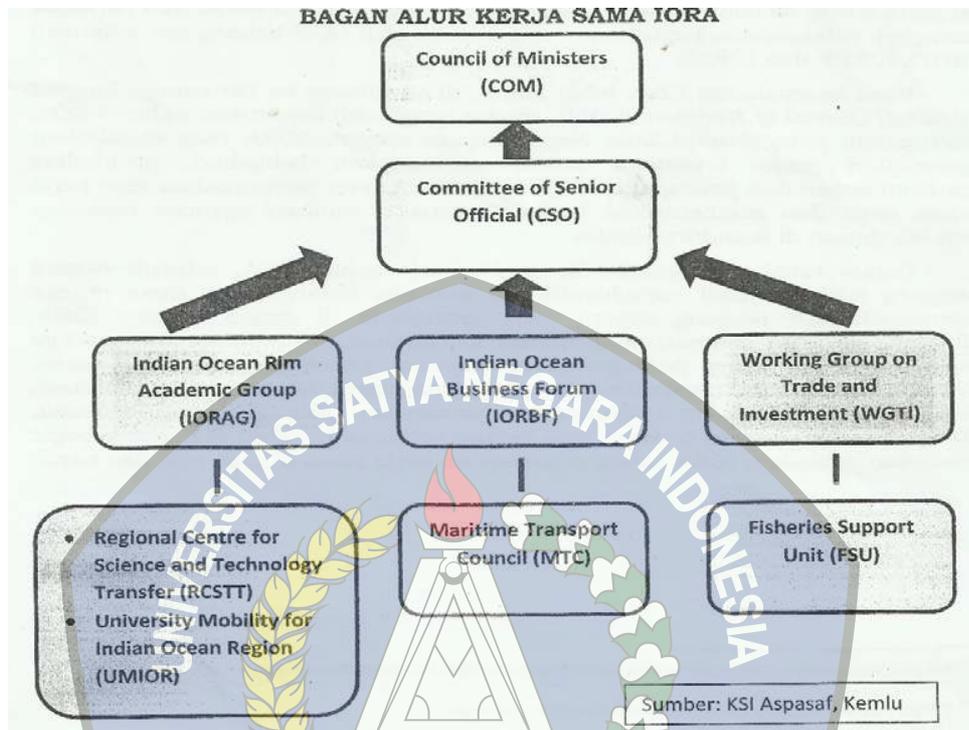
Ketiga sub-fora tersebut kemudian melaporkan setiap keputusan atau usulan kepada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior / *Committee of Senior Officials (CSO)*. CSO terdiri dari para pejabat pemerintah senior negara-negara anggota IORA, melakukan pertemuan paling tidak setahun sekali

dan bertugas mengkaji pelaksanaan keputusan yang diambil oleh COM bekerja sama dengan WGTI, IORBF, dan IORAG.

Hasil kesepakatan CSO, lebih lanjut, akan dibawa ke Pertemuan Tingkat Menteri, selaku pengambil keputusan akhir. COM merupakan para Menteri Luar Negeri negara anggota IORA yang melakukan pertemuan setiap tahunnya untuk merumuskan kebijakan, membahas perkembangan dan pencapaian kerjasama IORA serta memutuskan area kerjasama baru dan pembentukan badan khusus terhadap isu-isu umum di Samudera Hindia.

Dalam rangka penguatan kerangka kerjasama IORA, seluruh negara anggota telah berhasil mengidentifikasi prioritas bidang kerjasama jangka menengah dan panjang seperti yang termaktub di dalam Piagam IORA. Prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, memajukan transportasi kelautan, kerjasama perdagangan perikanan, penelitian dan manajemen, budidaya perikanan, pendidikan dan pelatihan, energi, teknologi dan informasi, kesehatan, perlindungan lingkungan, pertanian, dan penanggulangan bencana. Penguatan kerjasama berdasarkan bidang prioritas tersebut disusun sebagai pedoman kebijakan IORA dalam menetapkan kerjasama di area prioritas baru.

Berikut adalah bagan alur kerjasama IORA



4. Perkembangan Terkini IORA di Enam Prioritas Kerjasama

Tidak dapat dipungkiri, keketuaan India dan Australia di IORA telah membawa dampak positif yang cukup signifikan terhadap program kerja IORA, khususnya terkait pelaksanaan berbagai proyek peningkatan kapasitas di keenam sektor prioritas kerjasama. Mengerucutnya sektor prioritas IORA berdasarkan enam area ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi para anggotanya. Terlebih, momentum perubahan nomenklatur IORA menunjukkan upaya peningkatan eksistensi

IORA di dunia internasional sebagai forum besar dan penting di lingkaran Samudera Hindia.

Ruang lingkup dan fokus kerjasama di enam area prioritas IORA dibahas lebih lanjut pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, seperti yang tercantum dalam *Perth Communique*, yaitu:

1. Keselamatan dan Keamanan Maritim

Ruang lingkup kerjasama sektor keselamatan dan keamanan maritim meliputi ancaman dalam perdagangan maritim yang berkelanjutan, *piracy*, kebebasan laut lepas, pelaut dan nelayan serta hal-hal lain sesuai dengan *UN Convention on the Law of the Seas* (UNLOS). Dalam hal ini, diharapkan terjalin kerjasama yang kongkrit, termasuk melalui peningkatan diseminasi informasi mengenai peraturan dan hukum maritim.

2. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi

Kerjasama sektor fasilitasi perdagangan dan investasi bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan pengembangan ekonomi di Kawasan Samudera Hindia. Ruang lingkup kerjasama ini mencakup, di antaranya, pengembangan inisiatif *business-friendly* terkait isu ketahanan energi dan pangan, pariwisata dan infrastruktur serta mendorong aplikasi ekonomi biru

3. Manajemen perikanan

Kerjasama sektor manajemen perikanan, antara lain, menggaris bawahi komitmen untuk memerangi *illegal fishing* dan mendorong

eksplorasi sumber daya alam laut yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

4. Manajemen resiko bencana

Kerjasama sektor ini diarahkan pada penanganan bencana alam dan manajemen resiko serta upaya penanganan pencemaran laut.

5. Kerjasama Akademis, Sains dan Teknologi

Bentuk kerjasama sektor akademis, sains dan teknologi meliputi kerjasama penelitian, pelatihan (*capacity building*) serta *exchange of experts and scholar*. Sektor ini juga memiliki semangat untuk meningkatkan intensitas hubungan akademisi dengan *think-tanks* di wilayah lingkaran Samudera Hindia.

6. Promosi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan

Kawasan Samudera Hindia dikaruniai kekayaan serta keberagaman budaya yang begitu luar biasa. Kondisi tersebut menyiratkan perlunya hubungan antar masyarakat yang lebih erat, antara lain melalui kerjasama pariwisata, pendidikan, dan bisnis.

Melalui enam area prioritas kerjasama IORA ini, patut diakui bahwa arah kerjasama IORA lebih terarah.

B. Visi dan Misi Indonesia sebagai Ketua IORA

Sejak berdirinya IORA pada tahun 1997, sejumlah pencapaian telah dibuat oleh para negara anggotanya. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk dapat

memetik pelajaran sekaligus pengalaman tersebut. Sepanjang sejarah berdirinya selama hampir 18 tahun, IORA telah berganti keketuaan sebanyak tujuh kali. Negara-negara yang tercatat pernah mengemban mandat ketua adalah Republik Mauritius (1997-1998), Mozambik (1999-2000), Kesultanan Oman (2001-2002), Sri Lanka (2003-2005), Iran (2006-2008), Yaman (2009-2010), India (2011-2012), dan Australia (2013-2015).⁶

Saat ini Indonesia terpilih menjadi ketua *The Indian Ocean Rim Association* (IORA) untuk periode 2015 – 2017 setelah menggantikan keketuaan Australia pada tahun 2013–2015, dan untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan *15th IORA Council of Ministerial Meeting* (COM) di Padang tanggal 20–23 Oktober 2015 yang menandai keketuaan IORA. Penyelenggaraan COM ke-15 tersebut, berlangsung dengan sukses dan dihadiri oleh seluruh anggota, kecuali Komoros dan Somalia, serta diikuti oleh enam mitra dialog. Sekitar 290 delegasi hadir dan merupakan rekor partisipasi terbesar dalam sejarah pertemuan IORA.

Sebagai Ketua IORA untuk dua tahun kedepan, Indonesia telah menetapkan tema *Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean*. Indonesia menyadari pentingnya sumber daya laut, keamanan dan stabilitas, serta kerja sama maritim di Samudra Hindia bagi kesejahteraan masyarakat negara anggota IORA. Untuk itulah Indonesia mengusung tema memperkuat kerjasama maritim di Samudera Hindia yang damai dan stabil.

⁶ Kajian Mandiri BPPK ASPASAF Kemlu, Op. Cit., hlm. 41

Menlu Retno Marsudi saat membuka COM ke-15 di Padang menyebut arti strategis Samudera Hindia dan IORA dalam kebijakan luar negeri Indonesia.⁷ Menurutnya, negara-negara anggota dapat meningkatkan kerjasama maritim melalui enam prioritas IORA. Adapun enam prioritas utama dalam IORA adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan maritim, budidaya perikanan dan perairan, energi, manajemen risiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya. Hal tersebut juga dijadikan sebagai Visi Misi Indonesia dalam menjalin kerjasama strategis di IORA yang sejalan dengan poros maritim Indonesia.

Indonesia bersama Afrika Selatan yang bertindak sebagai Wakil Ketua IORA periode 2015-2017, bertekad bekerja sama secara erat dengan seluruh anggota IORA untuk secara aktif menindaklanjuti berbagai proyek dan inisiatif yang ada dibawah enam prioritas bidang kerja sama IORA. Indonesia sebagai Ketua juga menyampaikan beberapa inisiatif kerja sama baru guna meningkatkan kapasitas negara negara IORA yaitu antara lain mengadakan IORA *Bussiness Innovative Center*, kerja sama pendidikan para diplomat negara IORA, dan pelaksanaan Indian Ocean Dialogue ke-3.⁸

Selain berbagai kegiatan dan program untuk memperkuat kapasitas kolektif negara-negara IORA, keketuaan Indonesia juga akan memperkuat kelembagaan IORA dan mendorong regionalisme di Samudera Hindia. Atas usul dan inisiatif

⁷ Sigit Aris Prasetyo, Op. Cit., hlm. 8

⁸ Fajar Nugraha, "Indonesia Resmi Menerima Kepemimpinan IORA" di akses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183433/indonesia-resmi-menerima-kepemimpinan-iora> pada 19 jan 2016 pukul 13.50 WIB

Indonesia, negara-negara anggota IORA dalam dua tahun ke depan akan membentuk IORA Concord, untuk dapat diadopsi pada ulang tahun IORA ke-20 tahun 2017. Dalam kaitan ini dan untuk memperingati 20 tahun berdirinya IORA, Indonesia juga berencana untuk mengadakan KTT IORA atau IORA *summit* yang pertama pada tahun 2017. Pertemuan COM IORA mengesahkan tiga dokumen sebagai hasil pertemuan, yaitu Padang Communiqué, *Declaration on Maritime Cooperation in the Indian Ocean* dan *Decision on the Establishment of an Ad-hoc Committee on the IORA Concord*. Ketiga dokumen tersebut akan menjadi rujukan untuk kerja sama dan kegiatan IORA selama kepemimpinan Indonesia ke depan.

Selain memiliki visi untuk untuk memajukan IORA, Indonesia sebenarnya memiliki kepentingan strategis secara nasional seiring ketetuaan Indonesia. Sebagai salah satu negara terbesar di IORA dan agenda mewujudkan visi poros maritim, Indonesia semestinya melihat kepentingan untuk masa depan terkait Samudera Hindia. Adapun beberapa yang dapat dilakukan Indonesia, pertama semakin mendorong kesadaran masyarakat terkait arti penting Samudera bagi kepentingan Indonesia. Kawasan ini dapat menjadi masa depan Indonesia, dikaitkan dengan melimpahnya sumber daya alam, kelautan dan arti strategis lainnya. Kedua, Indonesia harus mengembangkan investasi dan pembangunan di kawasan yang menghadap Samudera Hindia. Dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2017, pemerintah sebenarnya telah menekankan dilakukannya pembangunan infrastruktur di kawasan barat Pulau Sumatra, termasuk pengembangan investasi, perdagangan dan pariwisata.

1. Penegasan Indonesia sebagai Negara Maritim melalui IORA

Menurut survei Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, jumlah pulau di Indonesia terdiri atas 17.504 pulau. Indonesia terletak pada posisi silang dunia, yaitu diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia. Luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta km² terdiri atas daratan 1,8 juta km², wilayah laut teritorial 3,2 juta km², perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,9 juta km², dengan garis pantai kurang lebih sekitar 81.000 km. Dengan demikian, total wilayah Indonesia adalah 77 % berupa perairan atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.⁹



Sumber: Catatanmap.com

⁹ Dishidros TNI AL, "Katalog Peta Laut dan Buku Nautika Indonesia", Dihidros TNI AL, Jakarta, 2004

Indonesia pernah mencapai puncak kejayaan maritim pada abad 7 sampai 14 pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang mampu menguasai dan mempersatukan Nusantara yang disegani bangsa lain. Paradigma masyarakat kala itu ialah menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan-keamanan. Namun, dalam perjalanan kehidupan bangsa, visi maritim Indonesia tenggelam. Masuknya penjajah kolonial pada abad ke – 18 yang menjajah selama lebih dari 350 tahun, mengkikis jiwa bahari bangsa Indonesia. Masyarakat dibatasi berhubungan dengan laut, dan di dorong melakukan aktivitas agraris demi kepentingan kolonialis.

Setelah Indonesia merdeka dari penjajah, masyarakat internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, *United Nation Convention on the Law of Sea (UNCLOS)* di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 1985. Konvensi ini ditandatangani oleh 117 negara dan berlaku secara efektif sejak 16 November 1994. Dengan demikian luas geografis wilayah NKRI menjadi bertambah.¹⁰

Konvensi tersebut memuat sembilan pasal mengenai prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip negara kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai alat yang

¹⁰ Tri Sulistyaningtyas, Susanto, Dicky R. Munaf, “Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 10

menyatukan pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya dan kemudian diimplementasikan oleh Indonesia sebagai “Wawasan Nusantara”. Hal ini berangkat melalui deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi dasar perjuangan Bangsa Indonesia untuk diakui sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk kembali meraih kedaulatan sebagai negara maritim sangatlah logis karena potensi kelutan Indonesia menyimpan banyak potensi di sektor ekonomi, diantaranya meliputi¹¹:

1. Perikanan laut
2. Perikanan perairan umum daratan
3. Budidaya laut
4. Budidaya perairan umum daratan
5. Pertambangan migas dan mineral lepas pantai
6. Pertambangan migas dan mineral di pantai
7. Migas dari laut
8. Industri bioteknologi hasil laut dan perairan umum daratan
9. Industri barang input perikanan
10. Transportasi laut, sungai dan danau
11. Pelabuhan laut, sungai dan danau
12. Industri kapal, mesin dan peralatan maritim

¹¹ Disampaikan Dr. Luky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam presentasi sebagai narasumber Pertemuan Kelompok Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014.

13. Bangunan kelautan lainnya
14. Industri hotel dan restoran pantai, laut dan perairan umum daratan.
15. Industri pertahanan dan keamanan laut
16. Jasa wisata pantai
17. Jasa pendidikan kelautan dan maritim
18. Jasa sistem logistik kelautan

Kondisi tersebut menyiratkan keunggulan komparatif sekaligus kompetitif Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Hal ini tentu saja membutuhkan pengelolaan secara optimal. Kebijakan pemerintah yang menjunjung tinggi alam serta lingkungan atau yang lebih dikenal dengan *blue economy* diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan di bidang kelautan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri satu hambatan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia adalah kondisi Infrastruktur laut, seperti:¹²

1. Kemampuan daya angkut armada nasional yang masih terbatas yang hanya mencapai 54,5 % dan 4 % untuk ekspor
2. Keterbatasan jumlah pelabuhan yang memenuhi standar internasional sehingga memicu hampir 70 % ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura
3. Keterbatasan akses permodalan bagi nelayan dan petani

¹² Dikomplikasi dari paparan Dr. Lucky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dalam Pertemuan Kelompok Ahli di Bogor, 21 Agustus 2014 dan Majalah Trans Media, Peluang Indonesia dalam Transportasi Laut Dunia, Kementerian Perhubungan, edisi 06/12 halaman 9.

4. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan
5. Sistem pendapatan kelautan dan perikanan
6. Belum adanya produk hukum yang mengatur pengelolaan potensi kelautan secara komperhensif
7. Sinkronisasi manajemen hulu hilir industri kelautan
8. Teknologi *from input to output of acean products.*

Tingginya tingkat ketergantungan antar negara dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi di era globalisasi membuat Indonesia tidak dapat berjuang sendiri. Tidak heran apabila Indonesia menganut kebijakan pengembangan kerjasama di kawasan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

IORA sebagai organisasi kerjasama di kawasan Samudera Hindia, dinilai memiliki bobot strategis bagi Indonesia, khususnya periode keketuaan 2015 – 2017 saat ini. Semangat nasional untuk mengembalikan kejayaan maritim, antara lain melalui mekanisme IORA, seperti halnya yang dikemukakan di dalam Visi-Misi Presiden – Wakil Presiden RI terpilih, seyogianya patut didukung semua pihak. Pengembangan konsep wawasan matra laut melalui sinkronisasi antara kepentingan nasional dengan program IORA niscaya merupakan salah satu cara dalam merebut kejayaan maritim Indonesia tersebut.

2. Kepentingan Strategis Indonesia di IORA

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Samudera Hindia memiliki bobot strategis bagi Indonesia baik dari segi geopolitik maupun geoekonomi. Selain sebagai jalur pelayaran utama distribusi minyak dan gas dunia, Samudera Hindia juga dilalui alur komoditas perdagangan internasional *Western Indo-Pacific*, yang meliputi Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Laut Arab, Teluk Bengal, Laut Andaman hingga ke Selat Malaka dan Singapura.

Selain itu, pada saat ini secara perlahan terjadi pergeseran gravitasi politik dan ekonomi dunia menuju Samudera Hindia. Hal ini tercermin, diantaranya dari nilai total ekspor-impor negara IORA berada di posisi ketiga dibandingkan kelompok ekonomi lainnya.

Database "Populasi & Perdagangan Group Negara" Agustus 2014

NO	Country Group	Population	Exports (\$)	Imports (\$)
1	BRICS	3.016.563.400	3.374.050.000.000	3.099.450.000.000
2	CEE	202.875.801	2.225.800.200.000	2.021.343.000.000
3	IOR-ARC	2.108.240.717	2.255.672.800.000	2.225.920.200.000
4	ASEAN	625.263.278	1.256.237.000.000	1.174.073.000.000
5	GCC	49.903.026	946.810.000.000	505.760.000.000
6	MERCOSUR	295.925.749	459.420.000.000	406.172.000.000
7	SAARC	1.666.185.761	377.990.800.000	573.115.000.000
8	COMESA	470.474.744	110.228.900.000	162.611.700.000
9	SACU	61.505.981	106.287.200.000	117.716.000.000
	TOTAL	8.496.938.457	11.112.496.900.000	10.286.160.900.000

Sumber: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook, dan berbagai sumber, diolah oleh BPPK

Berangkat dari posisi geostrategis di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia, Indonesia sudah selayaknya menjadi kekuatan poros maritim dunia. Presiden RI terpilih menangkap peluang tersebut dengan merumuskan suatu kebijakan yang kelak menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju, makmur, kuat, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam, dan budaya. Tentu saja, dibutuhkan langkah-langkah strategis, antara lain penguatan dan pengembangan sektor ekonomi kelautan berbasis inovasi ramah lingkungan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim atau tol laut.

Kebijakan strategis tersebut membutuhkan sokongan mekanisme kawasan. IORA pun muncul sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. Melalui forum IORA, Indonesia dapat menjalin kerjasama guna memanfaatkan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang terdapat di Samudera Hindia. Selain itu, bersama-sama dengan negara lainnya, Indonesia dapat mengembangkan suatu sistem tata kelola pemanfaatan Samudera Hindia demi kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan.

Arti penting dan tujuan strategis Indonesia di IORA dapat dimaknai melalui serangkaian perspektif, antara lain:

1. Politik dan Keamanan

Posisi strategis di kawasan menurut Indonesia untuk senantiasa berinteraksi dengan negara-negara kekuatan besar lainnya. Tidak dapat dipungkiri, negara tersebut memiliki kepentingan tertentu, termasuk terhadap kekayaan laut (perikanan dan mineral), keamanan navigasi serta *pengembangan maritime power projection*. Situasi tersebut menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Selain dari pada itu, kondisi tersebut juga menuntut Indonesia menaruh perhatian lebih dalam upaya mengamankan wilayah yuridiksinya dari penyalahgunaan matra laut nasional.

Di sisi lain, dibandingkan dengan negara-negara anggota IORA lainnya, anggaran pertahanan Indonesia menempati peringkat 5 besar pada tahun 2013. Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan adanya pekerjaan rumah tersendiri bagi peningkatan kemampuan pertahanan nasional.

Saat ini Indonesia menghadapi beberapa tantangan nyata di bidang politik dan keamanan sebagai berikut:

- Konstelasi *balance of power* di Samudera Hindia antara lain India yang didukung Amerika Serikat, dengan Tiongkok, yang didukung Pakistan, serta Rusia dalam persaingan energi, *war on terrorism* dan perdagangan senjata membuat wilayah ini sebagai ajang perebutan pengaruh diantara negara-negara besar. Hal ini tidak terlepas dari fakta Samudera Hindia sebagai jalur perdagangan dunia yang

kemudian memicu munculnya paradigma “neo-merkantilisme” dimana negara-negara membangun kekuatan laut untuk melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangannya. Tidak dapat dipungkiri, kondisi tersebut apabila tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berpotensi melahirkan konflik. Rencana pembangunan Terusan Tanah Genting Kra di Thailand dan rencana Malaysia untuk membangun saluran pipa dari Teluk Bengal ke laut Tiongkok Selatan disinyalir akan mengancam kepentingan Singapura di Kawasan Selat Malaka.

- Ancaman kejahatan *transnasional*, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan, terorisme, dan *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing*. Terkait dengan terorisme, dunia internasional pada saat ini sedang dikejutkan dengan kelompok *Islamic State of Iraq and Syam/Greater Syria (ISIS)* yang mendapat dukungan dari kelompok radikal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 15 Juli 2014 menyampaikan bahwa Abu Bakar Ba'asyir dan kelompoknya telah secara aktif mendukung ISIS dalam bentuk donasi dan bentuk rekrutmen “pejuang”. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Indonesia.
- Kawasan Samudera Hindia mencakup wilayah yang cukup luas. hal tersebut akan menyulitkan proses pencarian dan penyelamatan

bilamana terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, terdapat MoU kerjasama *Search and Rescue* (SAR) antara negara-negara IORA yang disepakati pada pertemuan COM ke-14 di Perth bulan Oktober 2014. Namun, sejauh ini baru terdapat lima negara IORA yang menandatangani

- Persengketaan wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan membutuhkan penanganan serius guna menghindari terjadinya konflik terbuka.

Serentetan tantangan tersebut tentunya membutuhkan penanganan serius dan seksama, termasuk untuk mengantisipasi munculnya konflik serta penguasaan Samudera Hindia oleh *major power* tertentu. Dalam hal ini, semangat yang terkandung dalam konsep *The East Asia Summit Treaty of Friendship and Cooperation for Indian and Pacific Ocean (Indo-Pacific Treaty)* menjadi relavan dan patut diusung Indonesia melalui IORA.

2. Ekonomi

Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Samudera Hindia. Indonesia mengharapkan peningkatan nilai ekspor Indonesia, nilai investasi asing di Indonesia, dan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya potensi Samudera Hindia, diantara 2,1 milyar penduduk serta sumber daya alam yang melimpah.

Tabel berikut menunjukkan besaran nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara IORA pada tahun 2013. Dari tabel ditunjukkan bahwa beberapa negara anggota IORA merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara IORA (2013)

NEGARA	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN	JUMLAH PERDAGANGAN
AFRIKA SELATAN	1.270.335,0	624.931,1	645.403,9	1.895.266,1
AUSTRALIA	4.370.482,1	5.038.166,5	-667.684,3	9.408.648,6
BANGLADESH	1.068.459,5	90.169,8	978.289,7	1.158.629,3
IRAN	469.356,4	99.047,2	370.309,2	568.403,6
INDIA	13.031.302,7	3.963.980,3	9.067.322,5	16.995.283,0
KENYA	233.201,4	13.964,4	219.237,0	247.165,8
MADAGASCAR	68.087,4	10.506,8	57.580,6	78.594,2
MALAYSIA	10.666.609,5	13.322.533,0	-2.655.923,5	23.989.142,4
MOZAMBIK	120.764,8	57.939,5	62.825,3	178.704,3
MAURITIUS	69.630,7	8.648,8	60.981,9	78.279,5
OMAN	209.388,3	252.951,6	-43.563,4	462.339,9
REPUBLIK KOMORO	2.807,9	49,7	2.758,2	2.857,6
SEYCHELLES	6.145,3	853,8	5.291,5	6.999,1
SINGAPURA	16.686.278,6	25.581.521,0	-8.895.242,4	42.267.799,7
SRI LANKA	390.925,9	49.531,8	341.394,1	440.457,7
TANZANIA	192.714,5	51.588,2	141.126,3	244.302,7
THAILAND	6.061.870,0	10.703.097,3	-4.641.227,3	16.764.967,2
UNI EMIRAT ARAB	1.589.066,7	1.809.358,0	-220.291,3	3.398.424,7
YAMAN	156.311,9	3.069,5	153.242,4	159.381,3

Sumber: Diolah dari Data Kementerian Perdagangan

Selain itu, Indonesia juga berkepentingan pada sektor-sektor berikut ini:

a. Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu kontributor utama ekonomi sekaligus sumber pangan dalam rangka menjamin aspek *food security*. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu berperan aktif dalam proses *rules and norms setting* dalam sektor manajemen perikanan di forum internasional, antara lain IOTC dan IORA

b. Perhubungan laut

Sebagaimana telah banyak disinggung sebelumnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya

Indonesia menjadi negara industri jasa perhubungan laut terbesar yang mampu berekspresi ke rute perdagangan di Samudera Hindia yang menyumbang 80 % dari total arus perdagangan dunia.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kandungan sumber daya mineral di Samudera Hindia cukup melimpah. Di dalamnya, terkandung lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia, 35% cadangan gas dunia, 60% uranium, 40% emas, 80% berlian dan berbagai macam zat mineral lainnya. Dengan potensi kekayaan kandungan alam yang demikian luar biasa, Indonesia kiranya dapat lebih aktif memanfaatkan berbagai potensi tersebut dalam rangka menunjang ketahanan energi nasional. Dalam upaya mencapai kepentingan ekonomi di IORA tersebut, Indonesia dituntut untuk melaksanakan pembangunan kelautan. Namun terdapat tantangan yang cukup serius dari perspektif makro kawasan, diantaranya adalah:

- Terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Amerika / Eropa ke Asia Timur dan dari Pasifik ke Samudera Hindia
- Pertumbuhan konsumsi penduduk global
- Kebijakan pangan negara-negara besar yang agresif turut mewarnai dinamika kawasan
- Perkembangan teknologi yang diharapkan dapat mendukung pembangunan maritim

Selain itu, terdapat tantangan internal dari negara-negara anggota IORA sendiri yang dapat menghambat kerjasama ekonomi di IORA, di antaranya disparatis ekonomi yang signifikan, serta perbedaan sistem politik dan sosial-budaya menjadi persoalan tersendiri. Kendati demikian, kondisi tersebut menawarkan peluang bagi Indonesia untuk dapat berperan lebih besar. Belajar dari peran aktif di ASEAN, Indonesia dapat menerapkannya di IORA dengan harapan semakin melancarkan arus kerjasama.

3. Sosial Budaya

Indonesia memiliki sejarah paling panjang dengan Samudera Hindia dan negara-negara di dalamnya. Berangkat dari fakta sejarah, kehidupan sosial dan kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh negara-negara di sekitar kawasan Samudera Hindia. Jejak budaya Indonesia, setidaknya dapat ditemukan di Sri Lanka dan Afrika Selatan melalui peninggalan Syekh Yusuf asal Makasar. Demikian sebaliknya, kehidupan sosial dan kebudayaan negara-negara di Samudera Hindia juga saling mempengaruhi satu sama lain.

Secara umum kepentingan Indonesia di IORA pada bidang sosial-budaya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan intensitas *people to people contact* antara negara-negara anggota IORA guna meningkatkan *socio cultural exchange* untuk mendekatkan penduduk negara-negara tersebut dan menghindari kesalahpahaman dan mendorong perdamaian. Kehidupan sosial

masyarakat Indonesia yang penuh toleransi dan kedamaian meskipun sangat beragam menjadi modalitas bagi Indonesia.

- Pelestarian kekayaan budaya negara-negara anggota IORA, khususnya Indonesia, di antaranya melalui pencatatan sebagai *world heritage* di UNESCO

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan bahasa serta agama mempunyai keunggulan dibandingkan negara lain. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi salah satu faktor perekat toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini perlu untuk dikembangkan dan menjadi modalitas Indonesia dalam mendorong kehidupan sosial dan perdamaian antara penduduk negara-negara IORA.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup

Samudera Hindia dan perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa. Namun kekayaan tersebut dapat terancam oleh pencemaran lingkungan. Pemanfaatan dan eksploitasi kawasan perairan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sosial-budaya, yang tidak berkelanjutan akan menyebabkan pencemaran dan rusaknya lingkungan. Kasus Montara adalah salah satu ilustrasi yang menyebabkan tercemarnya perairan Celah Timor akibat kebocoran kilang minyak lepas pantai Australia dan mengakibatkan taksiran kerugian finansial sebesar Rp. 22 triliun.

Terkait dengan hal tersebut, penting untuk disadari bersama perlunya kerjasama dari berbagai negara untuk mengembangkan *governance system*

(sistem tata kelola) pemanfaatan Samudera Hindia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran tersebut, maka pada akhirnya lingkungan hidup akan menjadi rusak akibat eksploitasi untuk kepentingan ekonomi semata. Termasuk dalam upaya membentuk sistem tata kelola tersebut adalah menjalin kerjasama mengenai pengaturan pencemaran lintas batas di laut. Hal ini penting untuk menjaga wilayah laut Indonesia dan juga Samudera Hindia.¹³

C. Diplomasi Maritim Indonesia di IORA

Di tengah perubahan dinamika ekonomi dan politik kawasan, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini didorong oleh letak geografis Indonesia yang ada di persimpangan antara dua samudera besar yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Seiring dengan perkembangan di abad 21, kedua samudera tersebut semakin memiliki arti strategis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai salah satu jalur transportasi utama bagi perdagangan global.

Posisi geografis mengisyaratkan bahwa Indonesia harus membangun laut untuk kemakmuran bangsa. Pembangunan Indonesia semestinya tidak hanya didasarkan pada potensi sumber daya alam saja, tetapi juga didasarkan pada posisi geografis yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Perubahan pandangan terhadap laut harus diikuti dengan kebijakan yang jelas bagaimana Indonesia

¹³ BPPK ASPASAF Kemlu, Op. Cit., hlm. 39

hidup dari laut dan dengan laut Indonesia akan diperhitungkan sebagai negara bangsa. Oleh sebab itu, kepentingan nasional lewat laut harus menjadi patokan utama dalam membangun dan memperjuangkan tujuan nasional.

Pada KTT Asia Timur ke-9, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Visi Poros Maritim. Gagasan tersebut berangkat dari visi dan misi Pemerintah 2014-2019 yang memuat cita-cita Indonesia sebagai negara maritim. Salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan tersebut dilakukan melalui penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim dan membuka peluang kerjasama kelautan melalui diplomasi maritim.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa diplomasi poros maritim memiliki dimensi kedaulatan (*sovereignty*), keamanan (*security*), dan kesejahteraan (*prosperity*) yang dilaksanakan melalui kebijakan luar negeri untuk mengidentifikasi, menegosiasikan, dan mempromosikan peluang untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Sejalan dengan program pemerintah 2014-2019 untuk memberdayakan sumber kemaritiman dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, diperlukan konsep dan operasionalisasi diplomasi kelautan yang sinergis dengan arah kebijakan nasional. Visi poros maritim secara operasional mencakup banyak sektor yang melibatkan sejumlah instansi dan kementerian, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bersama instansi lainnya memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan diplomasi untuk mendukung perwujudan Visi Poros Maritim.

Menimbang isu-isu strategis di kawasan Samudera Hindia, keberadaan IORA dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menjaga kepentingan NKRI dan mendukung diplomasi kelautan Indonesia yang senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982.

Dua tahun masa keketuaan Indonesia di IORA merupakan momentum bagi Indonesia untuk berperan penting sejalan dengan diplomasi maritim dan implementasi dari visi poros maritim. Sebagaimana salah satu visi poros maritim yaitu membangun konektivitas laut serta pelabuhan laut, Indonesia dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Sumatera, Jawa, dan beberapa kepulauan yang menghadap Samudera Hindia, hal lainnya Indonesia dapat membangun “*Public Awareness*” secara nasional terkait arti penting Samudera Hindia bagi Indonesia.

IORA dapat menjadi salah satu kendaraan Indonesia untuk memperkuat diplomasi maritim di Samudera Hindia. Sebagai ketua untuk periode 2015 – 2107, Indonesia dapat memasukan beberapa kepentingan strategis nasional dalam mengisi keketuannya, seperti penguatan kerjasama maritim yang dapat dilakukan dengan negara anggota IORA lainnya dalam upaya penanggulangan penangkapan ikan ilegal, pemberdayaan nelayan di pesisir pantai, bahkan kerjasama pembangunan infrastruktur.

1. Peluang dan Tantangan Diplomasi Maritim Indonesia di IORA

Peningkatan kerjasama bidang kemaritiman di kawasan dapat diawali dari pengarusutamaan agenda maritim dan kelautan untuk menjadi isu prioritas kawasan. Dalam hal ini, Indonesia dapat mendorong pengkajian atau peninjauan pembangunan konektivitas kelautan melalui *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dengan negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai ketua di forum regional IORA, maka pembentukan visi dan misi yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dari segi gagasan yang sangat strategis, seperti inisiatif untuk melakukan peningkatan kerjasama dalam rangka memelihara kawasan Samudera Hindia tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.

Seiring dengan keketuannya pelaksanaan diplomasi maritim di Kawasan Samudera Hindia memiliki peluang dan tantangan yang harus diperhatikan melalui enam prioritas kerjasamanya.

a. Keamanan dan Keselamatan Maritim

- Menciptakan keselamatan dan keamanan serta penegakan hukum di laut dengan cara meningkatkan operasi SOP terkait penanganan kasus penegakan hukum dan keamanan di laut serta membuat petunjuk batas wilayah negara

- Meningkatkan peran Pusat Marabahaya di laut secara terpadu dengan cara mengoptimalkan fungsi jaringan radar pesisir, penginderaan jauh satelit maritim, informasi elektronik kelautan, *integrated Monitoring System Navigation*, serta Observasi penelitian Kelautan, Integrasi sistem antar negara anggota IORA serta *sharing of information* terkait pengelolaan data pelanggaran bidang maritim.

- Memberdayakan masyarakat pesisir melalui penyuluhan atau bantuan sosial yang terkait dengan keamanan dan keselamatan; pengelolaan sumber daya yang setara dengan industri serta bantuan pendampingan hukum.

b. Fasilitas Perdagangan dan Investasi

Secara geostrategis, Samudera Hindia mempunyai potensi yang sangat besar. Tidak heran, apabila negara-negara yang tergabung di dalam organisasi lingkaran Samudera Hindia mempunyai potensi ekonomi yang besar diantaranya 2 milyar penduduk, 10 % PDB dunia serta 12 % *global market share*. Namun demikian IORA menghadapi masalah yang begitu pelik, yakni perbedaan skala ekonomi serta jarak yang jauh di antara negara anggotanya.

Demikian halnya dibidang investasi. Negara-negara IORA merupakan tujuan penanaman modal asing dengan *share* sebesar 13 % dari

total penanaman modal asing dunia. Indonesia pun berkepentingan untuk menarik investasi asing, termasuk dari negara-negara anggota IORA.

Terkait hal tersebut gagasan yang dapat diperjuangkan Indonesia antara lain:

- Merevitalisasi *Working Group on Trade and Investment (WGTI)* dan *Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)* yang sangat penting untuk memajukan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi.
- Memudahkan arus perdagangan antar negara IORA dengan melakukan penyederhanaan prosedur bea cukai untuk produk dari negara-negara IORA
- Pengembangan konsep *blue economy* secara berkelanjutan

c. Manajemen Perikanan

Sektor perikanan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, sebagai negara maritim, potensi perikanan Indonesia belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Aksi pencurian sumber daya laut Indonesia oleh pihak asing ditengarai menjadi salah satu sebab terpuruknya sektor perikanan di negara ini.

Perhatian masyarakat dunia saat ini tersedot pada isu pengelolaan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip *Ocean Good Governance*, seperti *Monitoring, Controlling, dan Surveillance (MCS)*. Untuk itu penting

bagi Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam sektor manajemen perikanan di berbagai forum internasional, termasuk IORA.

Salah satu upaya kongkret pemerintah adalah melalui pembentukan *rules and norms setting* yang dapat diperjuangkan demi kepentingan Bangsa Indonesia. Misalnya, sebagai negara yang aktif dalam *Indian Ocean Tuna Commision* (IOTC), Indonesia dapat mendorong kesepakatan pengaturan penangkapan ikan tuna di wilayah laut lepas Samudera Hindia, seperti halnya yang terdapat di dalam kerangka IOTC.

Selain itu, Indonesia seharusnya mengusulkan sejumlah gagasan untuk meningkatkan kerjasama di sektor *fisheries management* sebagai berikut:

- Merevitalisasi IORA *Fisheries Support Unit* (FSU), baik secara hukum atau program, guna menjaring lebih banyak bantuan dana dari pihak luar. FSU juga penting dalam upaya meningkatkan kerjasama dengan IOTC.
- Meningkatkan kerjasama teknik berupa pelatihan di bidang perikanan yang saling menguntungkan, khususnya di bidang-bidang yang menjadi keunggulan Indonesia maupun yang diharapkan Indonesia dapat belajar dari pihak lain yang lebih maju

d. Manajemen Risiko dan Bencana Alam

Negara-negara anggota IORA sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Manajemen Risiko dan Bencana Alam didasari pada metode-metode

yang telah dikembangkan dikawasan lainnya. Prioritas ini menarik bagi Indonesia mengingat segudang pengalaman dan pelajaran berharga yang berhasil dipetik dari sejumlah kejadian bencana alam besar, diantaranya Tsunami di Aceh

e. Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Secara umum, sebagai ketua IORA, Indonesia dapat menawarkan konsep pengembangan kerjasama di sektor Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini dengan gagasan sebagai berikut:

- Kerjasama akademis di bidang kemaritiman yang dapat diarahkan pada penelitian dan pengembangan sektor teknologi kelautan
- Mendorong kerjasama dan pertukaran ilmuwan atau peneliti di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama serta tidak berpotensi membahayakan keamanan negara.
- Kerjasama saling tukar menukar informasi mengenai kurikulum pendidikan di antara sesama negara anggota IORA.

f. Pariwisata dan Pertukaran Sosial-Budaya

Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor utama perekonomian Indonesia. Tetapi jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara anggota IORA dan

ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Padahal Indonesia memiliki pantai yang memiliki pesona begitu luar biasa. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mendapatkan sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan sebagai salah satu prioritas utama.

Beberapa peluang IORA di sektor budaya dan pariwisata bagi Indonesia diantaranya:

- Menjadi wadah untuk ajang promosi keindahan pariwisata yang berbasis bahari di wilayah Indonesia

- Sebagai penguat ikatan kebudayaan negara-negara IORA

Indonesia secara umum, memiliki empat kepentingan strategis sebagai ketua IORA

Diplomasi maritim di kawasan Samudera Hindia harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang secara optimal. Untuk itu diperlukan pemahaman terkait sektor-sektor kerjasama dan mekanismenya sehingga penajakan dan implementasi kerjasama dapat dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mengisyaratkan kembali ke laut. Sesungguhnya Presiden pertama kita memiliki kesadaran maritimnya. Melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, bangsa Indonesia mendeklarasikan Wawasan Nusantara yang memandang bahwa wilayah laut diantara pulau-pulau Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah nusantara.

Alasan untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim ialah melihat realita bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis, selain itu Indonesia memiliki potensi kelautan yang mempunyai peran terhadap perekonomian secara nasional bisa dilihat dari sektor perikanan, energi dan sumber daya mineral kelautan, pelayaran, pariwisata bahari, Industri dan Jasa Maritim.

Namun dalam pelaksanaan pengembangan potensi ekonomi kelautan Indonesia, tidak dipungkiri adanya berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada, untuk itu Indonesia menganut kebijakan pengembangan kerjasama di kawasan dengan mengedepankan diplomasi maritim.

Pengembangan kerjasama di kawasan dapat dilakukan di Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan bagian tak terpisahkan dari poros maritim

Indonesia karena dinilai memiliki bobot strategis bagi Indonesia baik dari segi geo-politik atau geo-ekonomi. Pelaksanaan diplomasi kelautan merupakan kunci penting bagi perwujudan visi Poros Maritim Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan melalui diplomasi maritim yang mengedepankan dimensi kelautan, keamanan, dan kesejahteraan.

Indonesia dapat memaritimkan diplomasi di kawasan Samudera Hindia melalui *Indian Ocean Rim Association* (IORA) yang memiliki enam prioritas agenda kerjasama dan dinilai sejalan dengan visi poros maritim Indonesia mulai dari keamanan dan keselamatan maritim, fasilitasi perdagangan ekonomi, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana alam, Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ke-enam prioritas tersebut kiranya dapat membantu perwujudan poros maritim apabila pemerintah terus melakukan upaya pengarusutamaan isu kelautan di kawasan dan forum regional tersebut.

Menlu Retno Marsudi saat membuka COM ke – 15 di Padang menyebut arti strategis Samudera Hindia dan IORA dalam kebijakan luar negeri Indonesia.¹ Menurutnya, negara-negara anggota dapat meningkatkan kerjasama maritim melalui enam prioritas IORA. Adapun enam prioritas utama dalam IORA adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan maritim, budidaya perikanan dan perairan, energi, manajemen risiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya. Hal tersebut juga dijadikan

¹ Sigit Aris Prasetyo, Op. Cit., hlm. 8

sebagai Visi Misi Indonesia dalam menjalin kerjasama strategis di IORA yang sejalan dengan poros maritim Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan Samudera Hindia, Indonesia melahirkan gagasan baru berupa IORA Concord yang ditetapkan saat Indonesia menjabat sebagai ketua di forum tersebut tahun 2015 lalu. Dan untuk pertama kalinya Indonesia juga mengajukan inisiatif untuk mengadakan IORA Summit pada tahun 2017 mendatang yang didukung oleh negara-negara anggota IORA lainnya.

B. Saran

Dalam memainkan diplomasi maritim di kawasan Samudera Hindia, Indonesia akan lebih baik jika terlebih dahulu melihat kepentingan nasionalnya sebagai isu-isu yang dapat dikembangkan melalui kebijakan yang ingin diterapkan di kawasan tersebut.

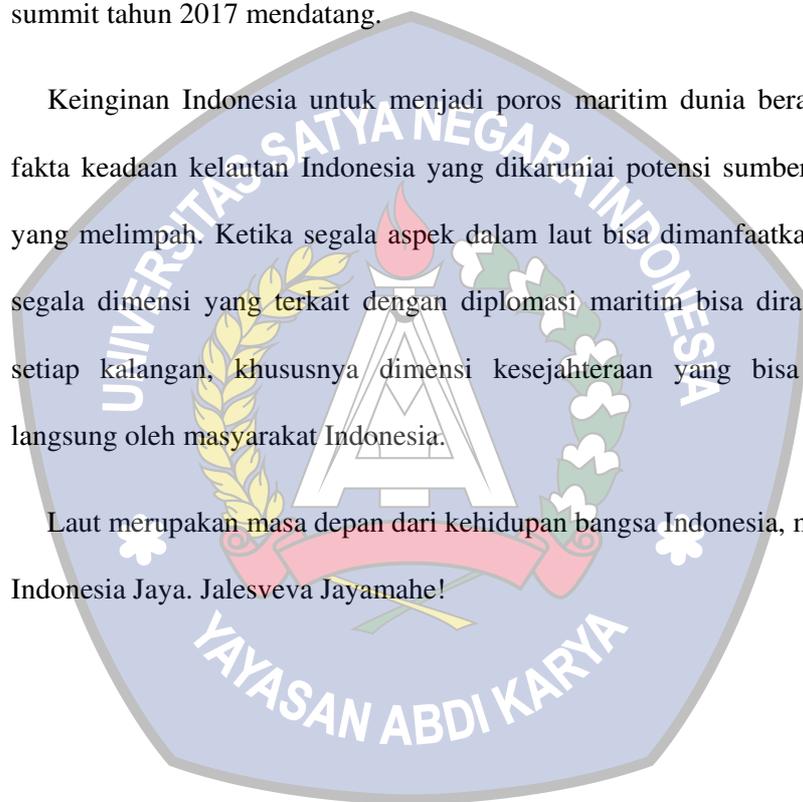
IORA memang sangat bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah untuk menggaungkan visi poros maritim Indonesia, tetapi kerjasama di bidang kemaritiman harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang kongkrit. Artinya melihat segala aspek kehidupan di wilayah Indonesia untuk dapat mengerti kondisi mana yang patut untuk dipromosikan dan mana yang patut untuk direvitalisasi.

Mengenai gagasan substantif yang dilahirkan Indonesia ketika resmi menjadi ketua (IORA concord & IORA summit 2017) akan berjalan dengan

baik jika dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Apabila semua disiapkan dengan baik, maka upaya meningkatkan IORA ke level yang lebih tinggi lagi kemungkinan besar akan terealisasi. Tidak lupa untuk terus memperkenalkan sisi Indonesia sebagai negara maritim dalam setiap pertemuan akbar yang dilakukan oleh IORA termasuk di dalam IORA summit tahun 2017 mendatang.

Keinginan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia berangkat dari fakta keadaan kelautan Indonesia yang dikaruniai potensi sumber daya laut yang melimpah. Ketika segala aspek dalam laut bisa dimanfaatkan tentunya segala dimensi yang terkait dengan diplomasi maritim bisa dirasakan oleh setiap kalangan, khususnya dimensi kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

Laut merupakan masa depan dari kehidupan bangsa Indonesia, melalui laut Indonesia Jaya. Jalesveva Jayamahe!



DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Agung, Anak dan Mochamad Yani, Yanyan. 2014. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Burchill, Scott dan Linklater. 1996. "*Theories of International Relations*". New York: ST Martin's Press INC
- Limbong, Bernhard. 2015. "Poros Maritim". Jakarta: Margaretha Pustaka
- Olton, Roy dan C Plano (terj.) Juanda, Wawan. 1999. "Kamus Studi Hubungan Internasional". Bandung: CV Putra Abardin
- Salim. 2014. "Kodrat Maritim Nusantara". Yogyakarta: LeutikaPrio
- Shoelhi, Mohammad. 2011. "Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional". Bandung: Remaja Rosdakarya
- Simangunsong, Bonar. 2015. "Laut, Masa Depan Indonesia". Jakarta: Gematama
- Sugiyono. 2014. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: ALFABETA
- Sulistyaningtyas, Tri, Susanto, dan R. Munaf, Dicky. 2015. "Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut". Jakarta: Gramedia Utama

Referensi

Aris Prasetyo, Sigit. 2016. “Arti Penting Samudera Hindia dan Visi Poros Maritim”. Jakarta: BPPK Aspasaf, Kementerian Luar Negeri RI

Aris Prasetyo, Sigit. 2015. “*Indonesia’s Chairmanship of IORA 2015-2017 and Beyond*”. Jakarta. Sesdilu Batch-55

Kuntjoro, Dorojatun. 2105. “Kerangka Strategi Jangka Sangat Panjang Merealisasikan IORA”. Jakarta: LIPI

P3K2 ASPASAF, 2015. “Indonesia dan *Indian Ocean Rim Association (IORA)* Tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan”. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

Vitto, Sigit, dan W. Prasetyo, Erry. 2015. “Diplomasi Poros Maritim Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar Negeri”. Jakarta: BPPK Kementerian Luar Negeri RI

Tabloid

Djumala, Darmansjah. 2015. “Mendiplomasikan Maritim, Memaritimkan Diplomasi”, *Gatra*, 11 Februari

-. 2015. “Diplomasi Indonesia akan Menonjolkan Karakter sebagai Negara Maritim”. *Tabloid Diplomasi*, 15 Januari – 14 Februari

-, 2015. “*Indian Ocean Rim Association (IORA) Peran Indonesia Memperkuat Kerjasama di Kawasan Samudera Hindia*”. Tabloid Diplomasi. 15 Februari – 14 Maret

Internet

Tiga Komponen utama regionalism terbuka IORA meliputi (i) liberalisasi perdagangan, (ii) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (iii) kerjasama ekonomi dan teknik. Diakses dari: <http://www.iora.net/about-us/how-iora-operates/scope-of-work.aspx>. Pada 17 Januari 2016. 14.25 WIB

Nugraha, Fajar. 2016 “Indonesia Resmi Menerima Kepemimpinan IORA”. di akses dari: <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183433/indonesia-resmi-menerima-kepimpinan-iora> pada 19 jan pukul 13.50 WIB

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014. <http://www.imf.org>.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

CURICULUM VITAE



Personal Details :

Name : Priyanti Handayani
Age : 23 years old
Gender : Female
Place, Date of Birth : Yogyakarta, July 31, 1993
Religion : Moslem
Marital Status : Single
Nationality : Indonesia
Adress : Jl. Masjid Darussalam No. 11 RT 006/004
Kedaung, Ciputat.
Mobile Phone : 089630998393
E-mail : priyantihandayani@gmail.com

Education Background :

1. 1999 - 2005 : Ciputat II Elementary School, South Tangerang
2. 2005 - 2008 : 86 Junior High School, South Jakarta
3. 2008 - 2011 : Yadika 5 Vocational High School, Pondok Aren
4. 2011 - 2016 : Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta

Qualifications :

Capable to organize well, Interested social activities, Friendly, willing to learn, adaptable, very open with new things, many more.

Work Experiences :

1. Internship : Jamsostek Indonesia
2. Internship : Ministry of Foreign Affairs of the Republic Indonesia
3. Sales Advisor : PT. Gagan Indonesia

HASIL WAWANCARA

(17 Januari 2016)



Narasumber: Bapak Firdaus Dahlan

Direktur Sekertariat IORA

1. Bagaimana perkembangan IORA saat ini semenjak Indonesia menjabat sebagai ketua di forum tersebut, kemana arah kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia?

“Indonesia saat ini baru menjabat sebagai ketua selama 3 bulan, akan tetapi Indonesia mampu memberikan gagasan yang substantif untuk memelihara kawasan Samudera Hindia untuk tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil dengan membentuk IORA concord yang sebelumnya belum pernah ada di IORA, dan gagasan yang baru ini akan tercatat sebagai sejarah nantinya. Menurut pandangan sekretariat IORA gagasan tersebut dinilai dari perspektif sebagai berikut: i) Melihat Samudera Hindia sebagai lalu lintas perdagangan dunia, cadangan energi, cadangan sumber perikanan (tuna), ii) dari segi *Security* untuk menghindari terjadinya konflik negara-negara *big power* atau negara-negara nuklir yang apabila tidak dijaga akan berdampak terhadap ketidakstabilan kawasan. Selain itu Indonesia juga berinisiatif untuk membentuk IORA summit pada tahun 2017 mendatang saat IORA memasuki usia 20 tahun, ini ditunjukkan untuk meningkatkan komitmen dari *leader* agar semua perangkat yang

ada di Samudera Hindia mulai dari *maritime safety community*, *fisheries management*, *risk management*, dan lain-lain dapat berjalan dengan baik. Artinya adalah Indonesia menjual gagasan untuk memajukan forum IORA ke tingkat yang lebih tinggi lagi ”.

- 2. Pemerintah saat ini mengkaitkan Visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan melakukan kerjasama atau diplomasi maritim di kawasan, dan IORA dinilai sebagai wadah yang tepat untuk menggaungkan visi tersebut. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Apakah Indonesia mampu menjalankan visinya melalui IORA? Sedangkan hanya terdapat 2 butir saja dari 6 prioritas agenda utama IORA di bidang kemaritiman, yaitu keselamatan dan kemandirian maritim, dan manajemen perikanan.**

“Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu *maritime cooperation*, berbicara mengenai *maritime cooperation* itu sangat luas, di IORA bukan hanya dua point saja yang terkait dengan maritim akan tetapi enam area utama kerjasama di IORA semuanya adalah termasuk kedalam kerjasama maritim, dikarenakan aspek maritim sangat luas sekali. Kita bisa ambil contoh *Tourism* yang bisa dikaitkan dengan pariwisata yang berbasis bahari karena justru negara-negara di IORA sangat tertarik dengan pariwisata yang berkaitan dengan lautan (pantai, diving, dll.) dan hal tersebut merupakan salah satu bagian dari maritim. Memang berbicara maritim adalah sesuatu yang berhubungan dengan laut dan itu ada di segala sektor dari prioritas IORA. Dari segi perdagangan, memanfaatkan sumber-sumber di laut. Melihat visi presiden dengan IORA adalah sangat sesuai, yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan keberadaan Indonesia di IORA untuk kepentingan nasional ”

3. **IORA merupakan satu-satunya organisasi yang anggotanya adalah negara-negara di lingkaran Samudera Hindia, tetapi keanggotannya belum meliputi seluruh negara di kawasan tersebut. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perluasan keanggotaan IORA?**

“Dalam Charter IORA dikatakan bahwa IORA terbuka terhadap setiap negara di lingkaran Samudera Hindia namun harus dilakukan secara bertahap, jadi IORA terlebih dahulu fokus terhadap kerjasama yang kongkrit dan optimal baru setelah berkembang satu persatu negara yang belum tergabung bisa menjadi anggota. Tetapi sejauh ini IORA tidak menolak negara yang apabila ingin bergabung dengan IORA. Terlihat dari bergabungnya negara Somalia saat pertemuan di Padang, walaupun Somalia dikategorikan sebagai negara *Low Developed Countries* (LDC’S) tetapi karena Somalia berada di kawasan Samudera Hindia maka Somalia sangat berhak untuk menjadi bagian dari anggota IORA”.

4. **IORA memiliki 7 mitra dialog di dalamnya, lalu apakah peran dan fungsi mitra dialog bagi IORA? Apakah mitra dialog IORA dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap perkembangan IORA di kawasan?**

“Tujuan utama IORA sebenarnya ialah bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan yang mempunyai enam prioritas, disisi lain IORA belum sepenuhnya memberdayakan negara-negara dialog. Dan untuk pertamakalinya saat pertemuan COM di Padang, Indonesia sudah memfasilitasi pertemuan dengan negara-negara dialog. Jadi, dengan adanya konsultasi formal antara menteri-menteri IORA dengan negara-negara dialog maka hal tersebut akan semakin membuka peluang atau semakin mendorong terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara negara-negara di IORA dengan *dialogue partner* nya”

5. Kepentingan nasional apa saja yang ingin dicapai Indonesia selama menjabat menjadi ketua? Apakah sejalan dengan visi poros maritim?

“Visi Presiden sudah ada, intinya adalah bagaimana kita memberdayakan laut lebih maksimum lagi kedepan. Sekarang sudah ada wadah kerjasama regional IORA yang melibatkan 21 negara yang didalamnya ada negara-negara berkembang, ada negara-negara yang sudah maju seperti Australia, Singapura yang merupakan negara *high income countries* yang mempunyai keahlian tertentu di bidang kelautan, begitupun juga India. Melalui kerjasama regional IORA ini kita harus mendapatkan *benefit* semaksimal mungkin untuk mendukung visi presiden. Sebagai contoh kita bisa memanfaatkan negara-negara yang sudah maju yang memiliki teknologi di bidang maritim untuk memajukan para nelayan di sekitar Pulau Barat Sumatra sampai ke Bali agar memiliki pengetahuan untuk menggunakan teknologi penyimpanan hasil tangkap (ikan) agar mempunyai kualitas yang baik dan harganya tetap tinggi. Intinya adalah mengambil manfaat dari negara yang memiliki kemampuan di bidang *fisheries* untuk diaplikasikan terhadap nelayan-nelayan Indonesia.”

